

**OPTIMALISASI PELAKSANAAN PERAN DAN FUNGSI BADAN
USAHA MILIK DESA (BUMDES) DESA BANTILANG
KABUPATEN LUWU TIMUR**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2025

**OPTIMALISASI PELAKSANAAN PERAN DAN FUNGSI BADAN
USAHA MILIK DESA (BUMDES) DESA BANTILANG
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh

Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S.AP)



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Optimalisasi Pelaksanaan Peran dan Fungsi Badan
Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Bantilang
Kab. Luwu Timur

Nama Mahasiswa : Satriani Masir

Nomor Induk Mahasiswa : 105611115620

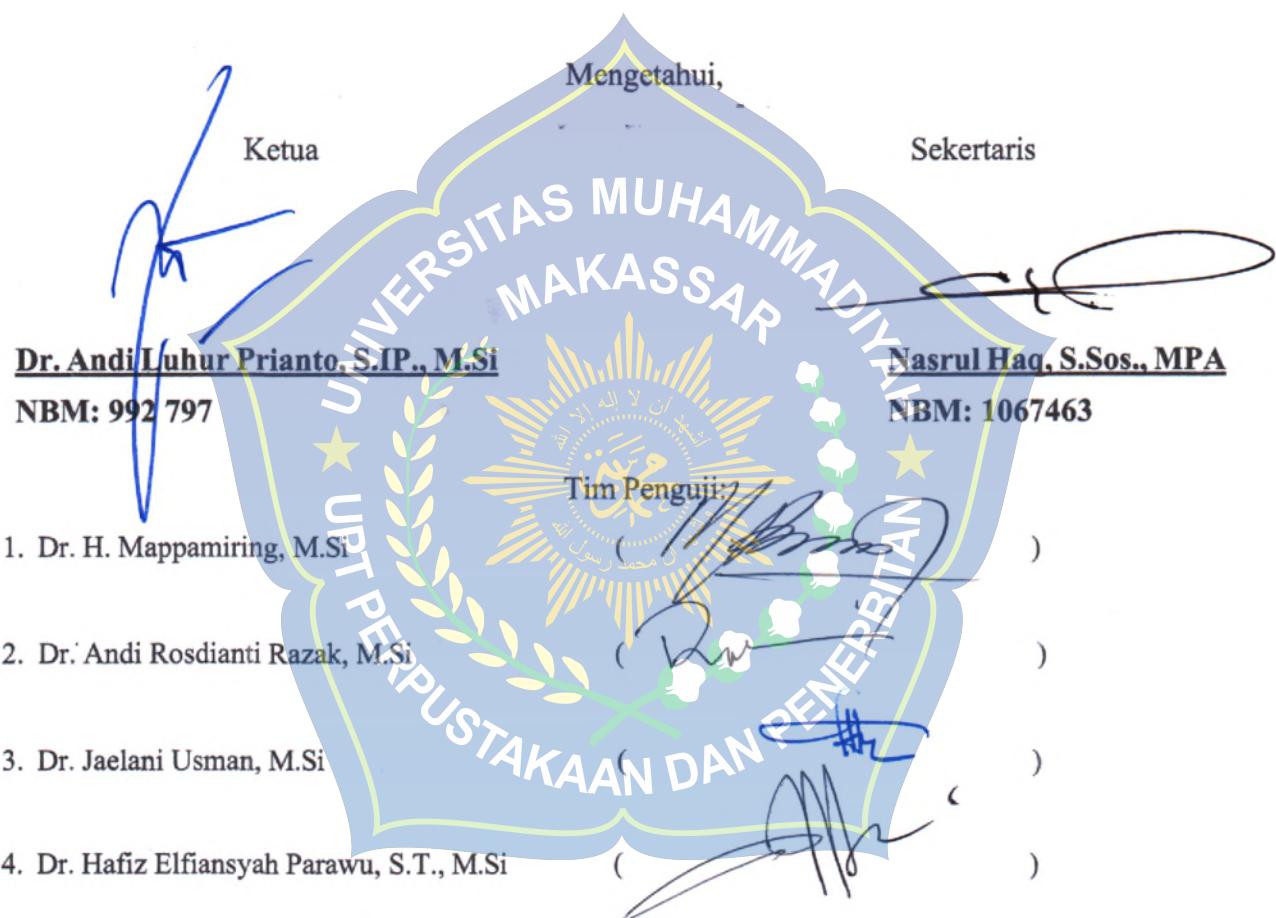
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara





LEMBAR PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Pengaji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0476/FSP/A.4-II/VIII/47/2025 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Kamis, 28 Agustus 2025.



HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Satriani Masir

Nomor Induk Mahasiswa : 105611115620

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar proposal penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.



ABSTRAK

Satriani Masir 2025. Optimalisasi Pelaksanaan Peran dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bantilang, Kabupaten Luwu Timur
(Dibimbing oleh Dr. Mappamiring,M.Si dan Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Jaya dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat di Desa Bantilang, Kabupaten Luwu Timur. BUMDes diharapkan dapat menjadi instrumen utama dalam mengelola potensi desa secara mandiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Desa Bantilang memiliki potensi ekonomi besar melalui komoditas merica, pelaksanaan peran dan fungsi BUMDes masih belum optimal. Faktor penghambatnya antara lain keterbatasan anggaran, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, minimnya keterlibatan masyarakat, dan belum tersedianya infrastruktur pendukung usaha. Optimalisasi peran dan fungsi BUMDes memerlukan upaya sinergis dari pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga terkait untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, mendorong partisipasi masyarakat, serta membuka akses terhadap pasar dan pendanaan. Dengan penguatan pada aspek-aspek tersebut, BUMDes diharapkan mampu berfungsi secara maksimal sebagai motor penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *BUMDes, optimalisasi, peran, fungsi, Desa Bantilang, ekonomi desa*

KATA PENGANTAR



AssalamuAlaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Optimalisasi Pelaksanaan Peran dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bantilang, Kabupaten Luwu Timur.”** skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik di universitas muhammadiyah makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang tentunya sepenuh hati meluangkan waktu dengan ikhlas memberikan informasi yang dibutuhkan. oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda Dr. Mappamiring,M.Si _ selaku pembimbing I dan Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan masukan. selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada bapak Masir dengan ibu Sakka selaku kedua orang tua saya terimakasih bapak, ibu telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mengarahkan, dan senantiasa mendoakan serta memberi dukungan yang tiada ternilai baik moral, maupun materi, nasehat serta pengorbanan yang tak terhingga dalam melalui hari demi hari dalam kehidupan ini.
2. Ayahanda Dr Andi Luhur Prianti, S.I.P.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah mengelolah fakultas dengan sebaik-baiknya.
3. Ayahanda Dr. Nur Wahid, S.Sos.,M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibunda Nurbiah Tahir, S.Sos.,M.AP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu

Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membagikan ilmunya selama proses perkuliahan.
6. Buat saudara-saudariku tercinta Kadang muhlisa dan nurbuana lia, dan teman-temanku serta keluarga yang tak dapat penulis sebut satu persatu yang senantiasa memberikan motivasi, serta bantuan yang tiada ternilai baik moral, maupun materil kepada penulis.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Satriani Masir

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Tinjauan Teori	13
C. Kerangka Pikir	30
D. Fokus Penelitian	32
E. Deskripsi Fokus Penelitian	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	34
B. Jenis dan Tipe Penelitian	34
C. Sumber Data	35
D. Informan Penelitian	36
E. Teknik Pengumpulan Data	36

F. Teknik Analisa Data	37
G. Teknik Pengabsahan Data.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambara Umum	39
B. Hasil Penelitian.....	44
C. Pembahasan.....	64
BAB V PEUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 3.1 Informan Penelitian	35



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	44
Gambar 4.2 Hasil Keratifitas PKK Desa Bantilang Mengelola Ikan Pangkilan	47



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan desa merupakan salah satu fondasi utama dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional yang merata, inklusif, dan berkelanjutan. Sebagai entitas pemerintahan terkecil yang berada paling dekat dengan masyarakat, desa memegang peranan yang sangat strategis dalam menggerakkan roda pembangunan dari lapisan paling bawah. Kedekatan pemerintah desa dengan warganya memungkinkan identifikasi kebutuhan riil masyarakat dilakukan secara cepat dan tepat, sekaligus memberikan peluang untuk merumuskan solusi yang selaras dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat (Widjaja, 2009).

Pembangunan desa tidak dapat hanya dipandang sebagai serangkaian prosedur administratif atau pelaksanaan program secara mekanis dari tingkat pusat ke bawah. Lebih dari itu, pembangunan desa harus dimaknai sebagai sebuah proses pemberdayaan masyarakat yang bersifat partisipatif, di mana warga didorong untuk aktif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Melalui proses pemberdayaan ini, masyarakat desa diharapkan memiliki kemampuan untuk mengelola, memanfaatkan, dan mengembangkan sumber daya yang dimilikinya secara mandiri, sehingga mampu menciptakan kesejahteraan bersama serta memperkuat kemandirian desa dalam jangka panjang. Hal ini dikenal dengan konsep pembangunan berbasis komunitas (community-based development) yang menekankan pada pentingnya keterlibatan langsung masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan. Dengan mengedepankan nilai partisipasi,

keberlanjutan, dan kearifan lokal, desa dapat menjadi pusat inovasi dan penggerak utama pembangunan daerah. Hal ini sekaligus menempatkan desa sebagai aktor kunci yang tidak hanya menjadi objek penerima kebijakan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki peran aktif dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan riil di wilayahnya.

Sejak era reformasi tahun 1998 dan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, paradigma pembangunan di Indonesia mengalami perubahan signifikan. Pola pembangunan yang sebelumnya bersifat sentralistik mulai bergeser menjadi desentralistik, di mana kewenangan pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya didistribusikan ke tingkat daerah dan desa. Hal ini sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B yang menegaskan pengakuan negara terhadap satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, termasuk desa, sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak asal-usul (Daldjoeni, 2011).

Penguatan peran desa kemudian diatur lebih rinci melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini memposisikan desa sebagai subjek pembangunan yang memiliki kewenangan lokal berskala desa, meliputi pengelolaan aset, perencanaan pembangunan, hingga penyusunan peraturan desa yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi lokal. Otonomi desa membuka peluang besar bagi pemerintah desa untuk mengembangkan inovasi dalam pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi potensi sumber daya alam serta sumber daya manusia (Bintarto, 2010). Dengan demikian, desa tidak lagi hanya sebagai pelaksana kebijakan dari atas, melainkan sebagai aktor aktif dalam proses

pembangunan yang partisipatif, demokratis, dan berbasis kearifan lokal.

Salah satu instrumen penting yang lahir dari kebijakan otonomi desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan. Gagasan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mulai muncul pada awal tahun 2000-an sebagai respon terhadap rendahnya tingkat kemandirian ekonomi desa. Pada masa itu, sebagian besar desa di Indonesia masih bergantung pada bantuan pemerintah pusat dan mengalami kesulitan dalam mengelola potensi lokal secara produktif. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk menciptakan sebuah lembaga ekonomi desa yang bersifat kolektif, berbasis pada partisipasi masyarakat, dan dikelola secara profesional dengan prinsip keuntungan untuk kesejahteraan bersama.

Konsep ini kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang untuk pertama kalinya secara eksplisit menyebutkan keberadaan BUMDes sebagai sarana untuk mengelola usaha desa. Selanjutnya, keberadaan BUMDes diatur secara lebih komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, serta Pembubaran BUMDes.

Urgensi pembentukan BUMDes didorong oleh beberapa faktor kunci. Pertama, adanya kebutuhan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) secara mandiri, mengurangi ketergantungan pada dana transfer pemerintah, dan

menyediakan sumber pembiayaan yang lebih stabil bagi pembangunan desa. Kedua, BUMDes diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal melalui pemanfaatan potensi desa, baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun peluang usaha yang belum tergarap. Ketiga, BUMDes menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi, sehingga memperkuat kohesi sosial dan rasa memiliki terhadap aset desa. Keempat, BUMDes berfungsi sebagai instrumen pemerataan ekonomi desa, mengurangi kesenjangan antar warga, dan menciptakan lapangan kerja di tingkat lokal.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, urgensi pembentukan BUMDes juga terkait dengan upaya menjaga ketahanan ekonomi desa di tengah perubahan global. Dengan mengembangkan usaha berbasis potensi lokal, BUMDes dapat meningkatkan daya saing desa, memperluas akses pasar, dan mengurangi kerentanan ekonomi akibat fluktuasi harga komoditas. Oleh karena itu, keberadaan BUMDes bukan hanya sebagai lembaga usaha, tetapi juga sebagai strategi pembangunan desa yang terintegrasi, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Pendirian BUMDes adalah mengelola aset desa, memberikan pelayanan jasa, dan mengembangkan usaha untuk kesejahteraan masyarakat desa (Kementerian Desa, 2014). BUMDes memiliki fungsi ganda: sebagai lembaga ekonomi yang berorientasi pada profit untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), dan sebagai lembaga sosial yang mendorong pemerataan manfaat ekonomi kepada seluruh warga (Novita Riyanti & Adinugraha, 2021). Prinsip-prinsip yang mendasari operasional BUMDes meliputi asas kekeluargaan,

kegotongroyongan, partisipasi aktif masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas.

Perkembangan BUMDes secara nasional menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Kementerian Desa (2023), hingga akhir tahun 2022 tercatat lebih dari 60 ribu BUMDes telah berdiri di seluruh wilayah Indonesia. Keberadaan BUMDes telah terbukti mampu menggerakkan perekonomian desa melalui berbagai unit usaha, seperti pengolahan hasil pertanian, pengelolaan wisata desa, usaha perdagangan, dan jasa keuangan mikro. Beberapa studi kasus, seperti BUMDes di Desa Ponggok, Jawa Tengah, atau BUMDes di Desa Pujon Kidul, Jawa Timur, menunjukkan bahwa inovasi usaha berbasis potensi lokal dapat mendongkrak perekonomian desa secara signifikan (Aji et al., 2022). Namun, di sisi lain, terdapat banyak BUMDes yang belum berjalan optimal akibat kendala struktural seperti keterbatasan modal, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, minimnya inovasi, dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Mulyana (2018) menegaskan bahwa keberhasilan BUMDes sangat bergantung pada kepemimpinan kepala desa, kapasitas pengurus BUMDes, dan dukungan masyarakat. Tanpa sinergi antara ketiga faktor tersebut, BUMDes akan sulit berkembang dan berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi desa. Hal ini menjelaskan mengapa BUMDes di beberapa wilayah tumbuh pesat, sementara di wilayah lain stagnan bahkan tidak aktif.

Salah satu desa yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan BUMDes adalah Desa Bantilang, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis, desa ini terletak di sisi timur Danau

Towuti dan telah lama menjadi pusat kehidupan masyarakat lokal. Mata pencaharian utama penduduk adalah bertani, khususnya di sektor perkebunan lada (merica) yang telah menjadi komoditas unggulan desa. Berdasarkan data lapangan, luas lahan perkebunan lada mencapai sekitar 4.239,8 hektar dengan total produksi tahunan 24.544 ton. Nilai ekonomi komoditas ini diperkirakan lebih dari Rp 1,16 triliun per tahun, menjadikannya sebagai tulang punggung perekonomian desa dan sumber pendapatan utama bagi sebagian besar keluarga.

Namun, potensi besar ini belum termanfaatkan secara optimal. Hasil investigasi awal peneliti menunjukkan bahwa BUMDes Harapan Jaya menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan modal usaha yang membatasi ekspansi unit usaha, rendahnya kapasitas manajerial dan keterampilan pemasaran pengelola, minimnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program BUMDes, keterbatasan infrastruktur pendukung seperti jalan dan sarana distribusi, serta ketergantungan pada penjualan komoditas mentah yang mengurangi nilai tambah ekonomi.

Kondisi awal yang ditemukan peneliti mencerminkan temuan Muslim et al. (2023) yang menyebutkan bahwa banyak BUMDes di Indonesia gagal berkembang karena tidak memiliki strategi optimalisasi yang jelas, kurang inovasi dalam pengelolaan usaha, dan tidak menguasai rantai pasok produk. Padahal, melalui strategi yang tepat, BUMDes dapat menjadi motor penggerak perekonomian desa yang berperan dalam peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus penguatan kelembagaan desa.

Konsep optimalisasi dalam konteks kelembagaan desa merujuk pada upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil terbaik (Nurrohman, 2022). Dalam pengelolaan BUMDes, optimalisasi mencakup peningkatan kapasitas manajerial, inovasi produk, diversifikasi usaha, penguatan jaringan pemasaran, dan pembentukan kemitraan strategis dengan pihak eksternal. Nia Febriani (2022) menekankan bahwa optimalisasi BUMDes harus mempertimbangkan potensi lokal, kebutuhan masyarakat, dan peluang pasar. Tanpa adanya strategi optimalisasi yang matang, BUMDes berisiko stagnan dan hanya berfungsi sebagai simbol kelembagaan tanpa memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat desa.

Fenomena yang terjadi di Desa Bantilang memperlihatkan adanya ketidaksinambungan antara potensi sumber daya yang melimpah dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Peneliti menemukan bahwa sebagian besar penduduk, khususnya sekitar 408 kepala keluarga, masih berada pada kategori pra-sejahtera tiga. Kondisi ini tentu sangat kontras dengan fakta bahwa Desa Bantilang memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dari sektor pertanian. Data menunjukkan bahwa 620 kepala keluarga di desa tersebut merupakan petani pemilik lahan, sehingga secara teoritis seharusnya mereka dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik.

Namun, realitas di lapangan memperlihatkan bahwa besarnya potensi desa belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengindikasikan adanya persoalan dalam pengelolaan sumber daya, terutama dari aspek manajemen dan kelembagaan. Desa Bantilang sebenarnya memiliki aset

ekonomi yang menjanjikan, seperti komoditas merica dan hasil perikanan, tetapi belum dikelola secara optimal untuk memberikan nilai tambah yang signifikan bagi warga.

Berdasarkan temuan awal tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi BUMDes Harapan Jaya, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong optimalisasi, serta merumuskan rekomendasi strategis yang berbasis pada data lapangan dan teori pembangunan desa. Dengan demikian, penelitian berjudul **“Optimalisasi Pelaksanaan Peran dan Fungsi BUMDes di Desa Bantilang, Kabupaten Luwu Timur”** diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kelembagaan ekonomi desa, meningkatkan kapasitas pengelolaan potensi lokal, serta memberikan manfaat bagi pengambil kebijakan, pelaku usaha desa, dan akademisi dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan utama yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana optimalisasi pelaksanaan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bantilang, Kabupaten Luwu Timur?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilaksanakan adalah Untuk mengetahui optimalisasi pelaksanaan peran dan fungsi BUMDES di Desa Bantilang Kabupaten Luwu Timur

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Dari Segi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang memperkaya pengetahuan serta menjadi bahan acuan bagi penelitian sejenis di masa mendatang. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi upaya perbaikan strategi pengelolaan dan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan BUMDes, sehingga mampu membangun kepercayaan serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

2. Dari Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan dan komprehensif mengenai optimalisasi pelaksanaan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bantilang. Informasi tersebut diharapkan mampu menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan, perumusan strategi, serta pengembangan kebijakan yang mendukung pengelolaan BUMDes secara efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan komponen penting dalam penyusunan karya ilmiah karena berfungsi sebagai rujukan konseptual sekaligus kerangka pembanding yang dapat memperkaya sudut pandang peneliti. Kajian terhadap penelitian sebelumnya tidak hanya membantu dalam merumuskan arah penelitian yang lebih fokus dan relevan, tetapi juga berperan dalam menunjukkan posisi serta kontribusi orisinal dari penelitian yang sedang dilakukan. Melalui telaah mendalam terhadap berbagai penelitian yang telah ada, peneliti dapat mengidentifikasi kesenjangan penelitian (*research gap*) yang belum banyak dikaji, sekaligus mengembangkan pendekatan baru untuk menjawab permasalahan yang diangkat.

Selain itu, peninjauan terhadap penelitian terdahulu menjadi landasan penting dalam menyusun kerangka teoritis dan metodologis yang tepat, serta membantu menghindari pengulangan topik yang bersifat duplikasi. Pada bagian ini, peneliti menyajikan sejumlah hasil studi yang memiliki keterkaitan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan fokus penelitian. Sumber tersebut berasal dari publikasi formal seperti jurnal ilmiah, prosiding, dan laporan penelitian, maupun dari karya ilmiah yang belum dipublikasikan secara luas seperti skripsi, tesis, dan disertasi.

Berikut ini disajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan mendukung kajian mengenai optimalisasi pelaksanaan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), khususnya dalam konteks pemberdayaan ekonomi dan tata kelola pembangunan desa:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode penelitian	Hasil pembahasan
1.	(Nia Febriani, 2022)	Optimalisasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kubang Jaya	Kualitatif	Menunjukkan bahwa mekanisme Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Sintang dalam melakukan pengawasan yaitu menyusun dan menelaah data objek pengawasan ketenagakerjaan, menyusun rencana kerja pemeriksaan obyek pengawasan ketenagakerjaan, menyusun rencana kerja pembinaan dasar pengawasan ketenagakerjaan, menyusun rencana kerja pengujian obyek pengawasan dan menyusun rencana kerja pengujian obyek pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan serta kesehatan kerja
2	Juhari Sasmito Aji, Dian Retnaning dia h dan Kemala Hayati (Aji et al., 2022)	Optimalisasi Peran Dan Fungsi BUMDes Astaguna Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Trihang	Kualitatif	Sosialisasi pendampingan dan pengelolaan BUMDes mengenai pentingnya penerapan prinsip tata kelola BUMDes yang ideal, dengan dirumuskan mengenai penetapan perencanaan bisnis dan strategi pemasaran, dilanjutkan pelatihan dan pendampingan pembuatan perencanaan bisnis untuk memberikan arah dalam menciptakan unit usaha baru khususnya outbond wisata air. Setelah pelatihan dan pendampingan implementasi teknologi informasi dan komunikasi melalui social media. Pada perencanaan dicantumkan adanya pelatihan dan pendampingan

				implementasi TIK dalam bidang administrasi, namun pengelola BUMDes telah mampu mengoperasikan TIK untuk pengelolaan keuangan dan lainnya.
3	Endik Hidayat(H id ayat, 2021)	Optimalisasi badan usaha milik desa (BUMDES) sebagai benteng ketahanan ekonomi desa selama pandemi	Kualitatif	<p>Perubahan yang tidak dapat dihindari bukan merupakan hal yang harus ditakuti, tapi harus dihadapi dengan berbagai strategi agar terbiasa menghadapi perubahan yang ada. era digital membawa dampak luar biasa terhadap dunia bisnis, khususnya bisnis digital. Terdapat tantangan perubahan yang lebih cepat cenderung dinamis. Sehingga diperlukan kesiapan didalamnya dengan aktor penggerak dalam organisasi yang terdiri dari : manajer puncak, komite manajemen perubahan, manajer yang bertanggungjawab dan tim yang menerapkan perubahan. berkembangnya bisnis digital menimbulkan beberapa perangkap yang sering muncul didalamnya yaitu: Mendorong Model Bisnis Digital Tanpa Memahami Nilai Pelanggan, Menjanjikan Keuntungan Tambahan Tanpa Memahami Proses Pengiriman, dan Penjualan dalam Peluang Digital Tanpa Memahami Formula Keuntungan Perusahaan. Ketiga jebakan yang sering muncul tersebut dapat diminimalisi dengan integrasi langkah antisipasi dengan manajemen transformasi. Langkah antisipasi fase pertama menganalisis nilai peluang</p>

			dengan strategi manajemen jet. Langkah antisipasi fase kedua manajemen resiko dengan integrasi manajemen aktif, dan langkah antisipasi fase ketiga dengan integrasi manajemen terencana
--	--	--	---

B. Tinjauan Teori

1. Konsep Pelaksanaan

Secara etimologis, implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Dalam konteks kebijakan publik dan administrasi pembangunan, istilah ini mengacu pada proses penerjemahan rencana, kebijakan, atau strategi ke dalam tindakan nyata yang terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut pendapat Usman (2002), implementasi tidak dapat dimaknai hanya sebagai rangkaian aktivitas semata, melainkan sebagai suatu bentuk aksi atau tindakan yang terstruktur dalam kerangka sistem yang telah dirancang. Implementasi mencakup kegiatan yang telah direncanakan secara matang dan dijalankan berdasarkan aturan, norma, dan pedoman tertentu guna mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, implementasi merupakan proses aktualisasi dari perencanaan menuju pencapaian tujuan yang bersifat konkret dan terukur.

Pengertian ini menekankan bahwa implementasi bukanlah aktivitas yang berlangsung secara spontan, tetapi merupakan suatu proses yang sistematis, terencana, dan berorientasi pada hasil. Aktivitas implementasi mencakup berbagai komponen seperti: keterlibatan aktor pelaksana, ketersediaan sumber daya,

kejelasan prosedur operasional, serta keberadaan mekanisme evaluasi dan pengawasan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaannya, tetapi juga oleh sejauh mana faktor-faktor pendukungnya dapat diorganisasi dan dioperasikan secara konsisten.

Dalam kerangka penelitian ini, implementasi pelaksanaan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dipahami sebagai proses konkretisasi dari kebijakan desa yang dituangkan dalam bentuk aktivitas ekonomi yang terstruktur dan berbasis pada kebutuhan serta potensi lokal. Implementasi dalam konteks ini mencakup perencanaan unit usaha, pengelolaan manajemen, pemberdayaan masyarakat, hingga evaluasi keberhasilan kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh BUMDes.

Dalam studi kebijakan publik dan administrasi, implementasi merupakan tahap kritis di mana kebijakan yang telah dirancang dan disahkan diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata. Implementasi mencakup proses dinamis yang menghubungkan antara niat kebijakan (*policy intention*) dan hasil di lapangan (*policy outcome*). Dengan demikian, pemahaman yang mendalam terhadap konsep implementasi menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan atau program dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Setiawan (2004), implementasi adalah proses perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan antara tujuan dan tindakan yang dilakukan untuk mencapainya. Dalam pandangannya, implementasi membutuhkan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif sebagai instrumen kunci dalam mentransformasikan kebijakan menjadi kegiatan operasional yang dapat dijalankan

secara konsisten. Dari definisi ini, implementasi dapat dimaknai sebagai upaya kolektif yang melibatkan berbagai pihak, di mana interaksi yang adaptif antara pelaku kebijakan dan struktur birokrasi menjadi prasyarat untuk keberhasilan pencapaian tujuan. Selain itu, proses ini juga mengandaikan adanya kemampuan aktor pelaksana dalam melakukan penyesuaian terhadap konteks sosial, budaya, dan kelembagaan yang melingkupinya.

Sementara itu, Harsono (2002) menjelaskan bahwa implementasi adalah proses pelaksanaan kebijakan yang bertujuan untuk mengubah keputusan politik menjadi bentuk tindakan administratif. Dalam pengertian ini, implementasi merupakan jembatan antara arena politik dan birokrasi, di mana substansi kebijakan yang dihasilkan melalui proses politik harus diterjemahkan secara teknis ke dalam program-program yang dapat dijalankan oleh aparatur pemerintahan. Proses ini menuntut adanya mekanisme koordinasi, ketersediaan sumber daya, dan prosedur operasional yang jelas agar kebijakan tersebut tidak berhenti hanya sebagai wacana atau dokumen formal.

Lebih lanjut, Rosyad (2019) menekankan bahwa implementasi juga merupakan bagian dari siklus kebijakan yang memungkinkan adanya ruang untuk pengembangan dan penyempurnaan program. Dalam proses implementasi, tidak jarang ditemukan kendala teknis maupun struktural yang memerlukan evaluasi ulang terhadap desain kebijakan. Oleh karena itu, implementasi tidak bersifat statis, tetapi justru menjadi kesempatan untuk mengadaptasi program agar lebih kontekstual dan sesuai dengan dinamika lapangan.

pelaksanaan merujuk pada proses teknis dan sistematis yang bertujuan untuk

menyelesaikan suatu pekerjaan atau program, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap akhir pelaksanaan. Proses ini mencakup tahapan-tahapan kerja utama, urutan kegiatan, serta metode operasional yang dirancang sedemikian rupa agar seluruh aktivitas yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif. Pelaksanaan menjadi bagian penting dalam suatu siklus manajerial, di mana seluruh rencana dan kebijakan diwujudkan melalui tindakan konkret di lapangan.

Menurut Hasfin Ansori et al. (2024), pelaksanaan didefinisikan sebagai suatu metode yang disusun secara teknis dan menggambarkan proses penyelesaian pekerjaan secara sistematis dari awal hingga akhir. Definisi ini menekankan pentingnya struktur dan metode dalam pelaksanaan, di mana setiap pekerjaan utama harus disertai dengan cara kerja atau prosedur tertentu yang memungkinkan pencapaian hasil secara efisien dan dapat dievaluasi secara objektif.

Sementara itu, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelaksanaan diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan untuk melaksanakan suatu rancangan, keputusan, dan sebagainya. Artinya, pelaksanaan merupakan tahap nyata dari suatu keputusan atau rencana, yang dijalankan dengan pendekatan metodologis agar tujuan dapat tercapai secara terukur.

Dalam konteks penelitian ini, pelaksanaan merujuk pada proses operasionalisasi peran dan fungsi BUMDes di lapangan, yang mencakup aktivitas kelembagaan, manajerial, teknis operasional, serta interaksi antara pelaksana (pemerintah desa, pengurus BUMDes, dan masyarakat) dalam mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi desa. Pelaksanaan menjadi indikator penting untuk menilai

efektivitas program desa, karena di dalamnya terkandung sejauh mana perencanaan dan kebijakan dapat diterjemahkan secara konkret dalam bentuk layanan, kegiatan ekonomi, atau pemberdayaan masyarakat.

Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Menurut Siagian S.P dalam (Adisasmita, 2011) mengemukakan bahwa Pengertian Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Pelaksanaan dalam program adalah hal yang penting, karena pelaksanaanlah yang mempengaruhi hasil dari pencapaian dalam program tersebut.

1) Fungsi Strategi Pelaksanaan adalah :

- a) Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan
- b) Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.
- c) Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.
- d) Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi

2. Konsep Bumdes

a. Pengertian Bumdes

Badan Usaha Milik Desa yang didefinisikan Pasal 1 Angka 6 UU No. 6/2014

Tentang Desa. "Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna untuk mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa". Lembaga usaha yang dikelolah oleh masyarakat dan pemerintah dalam upaya memanfaatkan potensi desa. Berdasarkan pengelolaannya maka, BUMDes adalah lembaga desa yang dikelola untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga mampu mengejar ketertinggalan dengan daerah-daerah lain seperti yang diamanatkan oleh UU Tentang Desa. Strategi kebijakan pembangunan di indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha-usaha desa dengan bekerja sama, BUMDes menjadi solusi bagi masyarakat desa dalam menempa kapasitas dan nantinya bisa terkelola desa yang baik. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur lebih terperinci dalam UU Desa tentang BUMDes pada BAB X kedalam tiga pasal antara lain :

Pasal 87 a) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang disebut BUMDes:

- 1) BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- 2) BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan udangan.

Pasal 88 pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1) Pendirian BUMDes disepakati oleh musyawarah desa.
- 2) Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan dengan

peraturan desa.

Pasal 89 hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk :

- 1) Pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan memberikan bantuan ke masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosil dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.
- b. Tujuan BUMDES

Tujuan Badan Usaha Milik Desa Adapun tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa dalam Peraturan menteri desa Nomor 4 Tahun 2015 BUMDes didirikan dengan tujuan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan perekonomian Desa
- 2) Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa.
- 3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonom
- 4) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak
- 5) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- 6) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- 7) Membuka lapangan kerja.
- 8) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa.
- 9) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Perekonomian pedesaan dengan model BUMDes, diharapkan mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Selain itu juga untuk menambah

Pendapatan Asli Desa (PAD).

c. Peran Bumdes

BUMDes dalam pembangunan desa memiliki peran yang strategis. Pengembangan potensi perekonomian desa dan menjadi ruang alternatif bagi masyarakat desa dalam membangun diri secara mandiri dan partisipatif. Pada intinya, BUMDes bergerak dalam bidang perekonomian dan akan berkembang sesuai dengan jenis usaha potensial yang dimiliki desa. Kementerian Desa telah mengkonstruksi skema pengembangan BUMDes sebagaimana diatur dalam Permendes No. 4 Tahun 2015

Menurut Seyadi, Menurut Seyadi (2003:16) indikator peranan BUMDes terhadap peningkatan perekonomian desa yaitu;

- a. Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi
- b. Masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- c. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- d. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.
- e. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa

BUMDES memiliki 3 aspek peran yang terdiri dari: penyediaan atau peningkatan layanan umum bagi masyarakat daerah, pemanfaatan aset desa, dan pemberian dukungan bagi usaha produksi masyarakat. Adapun secara rinci terdapat dalam Permendes Nomor 4 tahun 2015 sebagai berikut:

- 1) Penyediaan atau peningkatan layanan umum bagi masyarakat desa terdiri dari 2

jenis usaha yaitu: bisnis sosial sederhana dan usaha perantara atau jasa pelayanan

- 2) Pemanfaatan aset desa, terdiri dari jenis usaha bisnis penyewaan barang
- 3) Pemberian dukungan bagi usaha produksi masyarakat, yang terdiri dari 2 jenis usaha: usaha bersama atau induk unit usaha dan usaha produksi atau perdagangan barang dan keuangan mikro

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa BUMDES sebagai lembaga pengungkit perekonomian desa melalui peningkatan pelayanan umum dan mengoptimalkan aset desa. Selain itu, tampak juga bahwa BUMDES memiliki peran sebagai pendukung kegiatan usaha dan perekonomian masyarakat desa melalui fasilitas kegiatan ekonomi produktif desa

f. Fungsi Bumdes

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 87 ayat 1, fungsi BUMDes adalah sebagai lembaga yang mampu mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi SDA dan SDM. Selain berfungsi sebagai lembaga yang mampu mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagaimana yang termuat dalam penjelasan Undang-Undang Desa Pasal 87 ayat (1).

- 1) Lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi atau pelayanan umum masyarakat desa .
- 2) Lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.
- 3) Lembaga komersial yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa untuk

meningkatkan penghasilan. Dengan kata lain, entitas ini diharapkan menjadi lembaga yang membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di desa.

Sutoro Eko (2005) menyatakan bahwa salah satu fungsi utama BUMDes adalah memberdayakan masyarakat desa melalui kegiatan ekonomi. Indikator ini mencakup:

1. Peningkatan pendapatan masyarakat desa.
2. Tersedianya lapangan kerja baru.
3. Pemberian akses bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi lokal.
3. Konsep Desa
 - a. Pengertian Desa

R.Bintarto (2010:6) menyatakan desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur – unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan kultur yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah – daerah.

N.Daldjoeni (2011:4) Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai pemukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam

H.A.W. Widjaja (2009:3) Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman,

partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat

Paul H. Landis memberikan definisi desa lebih lengkap dengan ciri-ciri yang melekat pada masyarakatnya. Menurut Paul, desa memiliki 3 ciri yakni sebagai berikut:

1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antar ribuan jiwa
2. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan
3. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.
4. Konsep Peranan
 - a. Pengertian Peranan

Menurut Poerwadarminta (2003:161) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah peran memiliki beberapa makna yang berkaitan dengan fungsi dan tanggung jawab seseorang dalam suatu konteks. Pertama, peran dapat diartikan sebagai tokoh atau pemain yang diasumsikan dalam suatu sandiwara, di mana individu tersebut bertindak layaknya aktor yang memerankan karakter tertentu. Kedua, peran merujuk pada bagian atau tugas yang dimainkan oleh seorang aktor dalam pementasan, di mana ia berupaya menampilkan kemampuan terbaiknya untuk menjalankan karakter tersebut secara optimal. Ketiga, peran juga diartikan sebagai bagian dari tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh seseorang dalam suatu sistem atau organisasi. Dalam perspektif sosiologis, pengertian ini mengacu pada seperangkat perilaku, hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang diharapkan dari individu berdasarkan kedudukan atau posisinya di dalam masyarakat (Sambode et

al., 2019).

Sutarto (2009:138-139) mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- 1) Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
 - 2) Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
 - 3) Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.
- Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan peran sebagai berikut:
- a) Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu.
 - b) Peran adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu.
 - c) Peran berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak - hak dan kewajiban – kewajibannya sesuai dengan statusnya.
 - d) Peran terjadi bila ada suatu tindakan dan bilamana ada kesempatan yang diberikan.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto (2001:242) peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

- 1) Peran Aktif Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktivitas kelompok, seperti pengurus,

pejabat, dan lainnya sebagainya.

- 2) Peran Partisipatif Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
- 3) Peran Pasif Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi

b. Pengertian Optimalisasi

Secara umum, optimalisasi merujuk pada suatu proses sistematis yang bertujuan untuk mencapai hasil terbaik dari suatu kondisi atau sumber daya yang tersedia. Dalam berbagai konteks, termasuk administrasi publik dan pengelolaan kelembagaan, optimalisasi sering kali diartikan sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan suatu program, kebijakan, atau kegiatan agar memberikan manfaat maksimal.

Menurut Nurrohman, optimalisasi dipahami sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja, baik pada level individu maupun kelembagaan, yang berhubungan dengan kepentingan publik. Tujuan utama dari optimalisasi ini adalah untuk menciptakan tingkat kepuasan dan keberhasilan yang tinggi dalam penyelenggaraan suatu kegiatan atau pelayanan. Definisi ini menekankan dimensi produktivitas dan akuntabilitas, di mana optimalisasi menjadi alat untuk memperbaiki kualitas output dan mengurangi hambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung pada masyarakat luas.

Sementara itu, menurut Mohammad Nurul Huda, istilah optimalisasi berasal

dari kata dasar *optimal*, yang berarti paling baik atau paling tinggi. Dalam pengertiannya, mengoptimalkan berarti menjadikan sesuatu pada titik terbaik atau kinerja tertinggi yang mungkin dicapai. Oleh karena itu, optimalisasi adalah proses untuk membawa suatu sistem, proses, atau kegiatan ke dalam kondisi paling ideal, baik dari segi hasil maupun efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan demikian, optimalisasi bukan hanya berbicara tentang capaian kuantitatif semata, melainkan juga bagaimana proses mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan secara rasional, terukur, dan efisien.

Agung Kurniawan (2022) mengemukakan bahwa *optimalisasi* merupakan suatu tindakan yang dirancang untuk mencapai hasil terbaik melalui pemanfaatan kondisi atau sumber daya yang tersedia secara maksimal. Tujuan utama dari proses ini adalah meminimalkan penggunaan tenaga, biaya, dan risiko, sekaligus mampu memenuhi kebutuhan secara menyeluruh. Konsep ini menjadi sangat relevan terutama dalam pengelolaan organisasi publik maupun lembaga berbasis masyarakat seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), di mana keterbatasan sumber daya menuntut adanya strategi pengelolaan yang cerdas, efisien, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan.

Lebih lanjut, Rudiadi (2022) menegaskan bahwa optimalisasi dilakukan dengan cara memaksimalkan suatu fungsi objektif tanpa melanggar batasan atau kendala yang telah ditetapkan. Melalui penerapan optimalisasi, suatu sistem dapat meningkatkan efektivitasnya, baik dalam bentuk peningkatan keuntungan, percepatan waktu proses, maupun pengurangan pemborosan sumber daya. Dengan demikian, optimalisasi bukan hanya sekadar upaya peningkatan kinerja, tetapi juga

merupakan strategi pengelolaan yang mengintegrasikan efisiensi, inovasi, dan keberlanjutan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Mahcfud Siddiq (2001:8), Ada beberapa indikator dalam melakukan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tujuan: Tujuan bisa berbentuk maksimisasi atau minimisasi, Bentuk maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk minimisasi akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya.
 - 2) Alternatif Keputusan: Alternatif keputusan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.
 - 3) Sumberdaya yang Dibatasi: Sumberdaya merupakan pengorbanan
- c. Manfaat dan Tujuan Optimalisasi

Optimalisasi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mencapai hasil terbaik dari berbagai alternatif pilihan yang tersedia, dengan mempertimbangkan sumber daya, waktu, dan kondisi yang ada. Menurut Nia Febriani (2022), optimalisasi tidak selalu berarti memperoleh keuntungan tertinggi, tetapi lebih pada upaya untuk memaksimalkan potensi atau hasil tertentu berdasarkan tujuan spesifik. Dalam beberapa kasus, optimalisasi dapat berarti memaksimumkan manfaat atau sebaliknya meminimumkan biaya, tergantung pada arah kebijakan atau strategi yang ditetapkan. Intinya, optimalisasi bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas secara bersamaan.

Dalam konteks kelembagaan desa seperti BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), optimalisasi sangat penting dilakukan agar lembaga ini tidak hanya eksis secara

administratif, tetapi juga mampu menjalankan fungsi ekonomi dan sosial secara maksimal. Proses optimalisasi diharapkan dapat mengatasi keterbatasan sumber daya, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta memperbesar dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berikut ini adalah beberapa manfaat utama dari proses optimalisasi, khususnya dalam konteks pengelolaan kelembagaan seperti BUMDes:

1) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Optimalisasi memungkinkan penggunaan sumber daya (modal, tenaga kerja, aset desa, waktu) secara lebih efisien, sehingga tidak terjadi pemborosan dan setiap komponen memberikan kontribusi yang maksimal terhadap hasil yang dicapai.

2) Meningkatkan Kinerja Organisasi

Melalui optimalisasi, kinerja kelembagaan seperti BUMDes dapat ditingkatkan baik dari segi manajerial, operasional, maupun pelayanan kepada masyarakat. Lembaga menjadi lebih produktif dan responsif terhadap kebutuhan desa.

3) Maksimalisasi Pendapatan

Salah satu target utama optimalisasi adalah meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui pengembangan unit-unit usaha BUMDes yang dikelola secara profesional. Hal ini akan berdampak langsung pada kapasitas keuangan desa dalam menyelenggarakan pembangunan.

4) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Dengan optimalisasi, kegiatan ekonomi desa dapat menyerap tenaga kerja,

menciptakan peluang usaha baru, dan mendistribusikan manfaat ekonomi secara lebih merata di antara warga desa.

5) Penguatan Kelembagaan Desa

Proses optimalisasi mendorong perbaikan dalam aspek tata kelola (governance), akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan usaha desa, yang pada akhirnya memperkuat sistem kelembagaan di tingkat lokal.

6) Peningkatan Daya Saing Produk Lokal

Optimalisasi juga dapat diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah dari komoditas unggulan desa, sehingga produk yang dihasilkan memiliki daya saing di pasar yang lebih luas (lokal, regional, bahkan nasional).

Berdasarkan makna optimalisasi yakni mengoptimalkan apa yang sudah ada berarti bisa disimpulkan tujuan optimalisasi adalah sebagai berikut: (Nia Febriani, 2022).

- 1) Memperoleh hasil lebih baik.
- 2) Tidak perlu menambah modal atau dana
- 3) Menghemat waktu
- 4) Memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sudah ada
- 5) Mempercepat selesainya pekerjaan.

Berikut ini merupakan tujuan optimalisasi (Nia Febriani, 2022)

- 1) Mengatasi Masalah Dari Dalam Manfaat optimalisasi adalah bias mengatasi persoalan dari dalam, artinya permasalahan akan bisa diselesaikan dengan baik jika memanfaatkan dengan maksimal apa yang biasa dilakukan atas sesuatu

yang telah dimiliki.

- 2) Pengambilan Keputusan Melalui optimalisasi akan mendapatkan beberapa informasi penting terkait sebuah masalah. Hal ini dapat digunakan oleh para stakeholder untuk mengatasi sebuah masalah dengan baik dan cepat, dengan begitu proses yang terhambat bias segera teratasi.
- 3) Menghemat Sumber daya Mengingat optimalisasi adalah sebuah proses untuk melakukan sebuah kegiatan dengan seefisien mungkin dengan hasil yang optimal, maka hal yang dilakukan dengan sumber daya dan sumber dana yang ada.



C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan representasi konseptual yang menggambarkan alur logika berpikir peneliti dalam memahami, merumuskan, dan memecahkan permasalahan penelitian. Kerangka ini menjelaskan secara sistematis fenomena manajemen BUMDes yang tugas dan fungsinya belum berjalan secara efektif, hal ini dapat dilihat dengan menggunakan teori Sutaro Eko yang secara fungsi dapat dinilai bagimana bumdes dalam meningkatkan pendapatan, lahirnya lapangan kerja baru, serta akses masyarakat dalam keterlibatannya di kegiatan ekonomi lokal. Selain daripada itu, peran bumdes juga dilihat menggunakan kacamata seyadi yang dimana akhir dari kedua pandangan ini menjadi tolak ukur dalam melihat efektifitas kinerja bumdes di desa Bantilang.



D. Fokus Penelitian

Salah satu hal yang menjadi faktor penting dalam penelitian adalah fokus penelitian, yang memberikan pembatasan penelitian dan digunakan sebagai dasar dalam mengumpulkan data agar tidak terjadi kesalahan pengambilan data dan dilakukan dengan mendalam secara kualitatif tentang bagaimana optimalisasi peran dan fungsi BUMDES dalam Pelaksanaan tugasnya di Desa Bantilang .

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan, maka penulis mendeskripsikan fokus dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Optimalisasi peran dan fungsi BUMDes dimana disini adalah memperbaiki manajemen BUMDes desa Bantilang
2. Peningkatan pendapatan masyarakat desa. terkait optimalisasi peran dan fungsi BUMDES di Desa Bantilang kecamatan Towuti Kab Luwu Timur
3. Tersedianya lapangan kerja baru terkait optimalisasi peran dan fungsi BUMDES di Desa Bantilang kecamatan Towuti Kab Luwu Timur
4. Pemberian akses bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi lokal terkait optimalisasi peran dan fungsi BUMDES di Desa Bantilang kecamatan Towuti Kab Luwu Timur.
5. Efektifitas dapat dipahami sebagai ukuran keberhasilan BUMDes yang menekankan pada pencapaian tujuan secara nyata dan berdaya guna.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan, dengan lokasi penelitian berpusat di Kantor Desa Bantilang, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk mengungkap secara mendalam bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi dan pengelolaan potensi lokal di Desa Bantilang, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya memahami secara komprehensif strategi, hambatan, dan upaya BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya melalui pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif bersifat menjelaskan dan menggambarkan fenomena yang diteliti secara mendalam. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai realitas empiris di balik fenomena yang terjadi terkait optimalisasi pelaksanaan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bantilang, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menguraikan kondisi nyata di lapangan,

termasuk strategi, tantangan, serta faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kinerja BUMDes dalam mengelola potensi desa.

C. Sumber Data

Secara umum, terdapat dua jenis data yang sering digunakan dalam penelitian, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada penggunaan data kualitatif sebagai dasar analisis. Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk kata-kata atau uraian verbal yang menggambarkan suatu fenomena secara mendalam. Data ini diperoleh melalui berbagai teknik, salah satunya wawancara dengan pihak-pihak yang relevan.

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan jenis data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama tanpa melalui perantara, baik dari individu maupun kelompok. Data ini dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, penulis mengumpulkan data primer melalui metode survei dan observasi.

Metode survei dilakukan dengan menyampaikan pertanyaan, baik secara lisan maupun tertulis, kepada pihak-pihak terkait. Penulis melakukan wawancara mendalam dengan pengurus BUMDes, perangkat Desa Bantilang, serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ekonomi desa untuk memperoleh informasi yang relevan.

Selain itu, peneliti juga menerapkan metode observasi, yaitu teknik

pengumpulan data primer dengan melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas, proses kerja, serta situasi yang terjadi di lapangan. Observasi ini mencakup kegiatan BUMDes dalam mengelola potensi desa, interaksi antara pengurus dan masyarakat, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Data sekunder itu berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter.

D. Informan Penelitian

Fokus penelitian memilih informan sebagai sumber data, untuk mengumpulkan data, analisis data, menilai kualitas data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah :

	NAMA	STATUS
1	Iqbal S.Sos	Kepala Desa Bantilang
2	Masri S.Sos	Ketua BUMDes Bantilang
3	Kartini	Ketua PKK
4	Saida	Masyarakat
5	Alias	Petani`
6	Kadang Muhlis	Sekretaris Bumdes
7	Ramasia	Pelaku UMKM
8	Nasruddin	Pegawai Desa

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara.

1. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai arsip, dokumen, dan catatan resmi yang berkaitan dengan kegiatan serta pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bantilang. Dokumen tersebut meliputi laporan keuangan, notulen rapat, data program kerja, serta regulasi dan kebijakan desa yang relevan. Melalui metode ini, penulis memperoleh data pendukung yang dapat memberikan gambaran lebih lengkap mengenai peran dan fungsi BUMDes dalam mengelola potensi desa secara optimal.

2. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk menemukan fakta-fakta yang relevan dengan fokus penelitian. Instrumen yang digunakan adalah observasi non partisipan tidak terstruktur, di mana peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati, namun tetap mencatat setiap peristiwa dan informasi penting. Sifat instrumen yang fleksibel ini memudahkan peneliti dalam menggali informasi terkait pelaksanaan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bantilang. Observasi ini digunakan untuk mengamati berbagai aktivitas BUMDes, mulai dari proses perencanaan program,

pelaksanaan kegiatan, hingga interaksi antara pengurus dan masyarakat desa.

3. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan melalui percakapan langsung antara peneliti dan narasumber dengan tujuan menggali informasi secara mendalam menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terarah dan teknik wawancara tertentu. Wawancara dipahami sebagai bentuk komunikasi dua arah yang memiliki maksud khusus, yakni memperoleh data yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam konteks penelitian ini, subjek wawancara meliputi pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), perangkat Desa Bantilang, serta masyarakat yang terlibat atau merasakan langsung dampak program BUMDes. Melalui wawancara ini, peneliti berupaya mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai strategi, kendala, dan peluang yang dihadapi BUMDes dalam mengoptimalkan peran dan fungsinya.

F. Teknik Analisa Data

Adapun data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. Dalam penelitian kualitatif, kegiatan analisis data dimulai sejak peneliti melakukan kegiatan pra lapangan sampai dengan selesainya penelitian. Dalam penelitian kualitatif, teknik analisa data yang digunakan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah. Data yang dikumpulkan sebagian besar merupakan data kualitatif dan teknik analisis menggunakan analisis taksonomi. Analisis taksonomis yaitu bentuk analisis yang lebih rinci dan mendalam dalam membahas suatu tema atau pokok permasalahan. Dimana domain atau bidang yang ditonjolkan perlu dilacak secara mendalam dan terinci struktur internalnya.

G. Teknik Pengabsahan Data

Triangulasi bermakna yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari berbagai sumber data, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain, serta pengecekan pada waktu yang berbeda

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode bermakna data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu, diuji keakuratan atau ketidak akuratannya.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu berkaitan dengan variasi waktu dalam proses pengambilan data, yang bertujuan untuk menguji kredibilitas temuan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh pada waktu atau situasi yang berbeda, baik melalui observasi, wawancara, maupun metode pengumpulan data lainnya. Dengan penerapan triangulasi waktu, peneliti dapat memastikan konsistensi informasi yang diperoleh serta meminimalkan bias yang mungkin muncul akibat kondisi tertentu pada saat pengumpulan data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

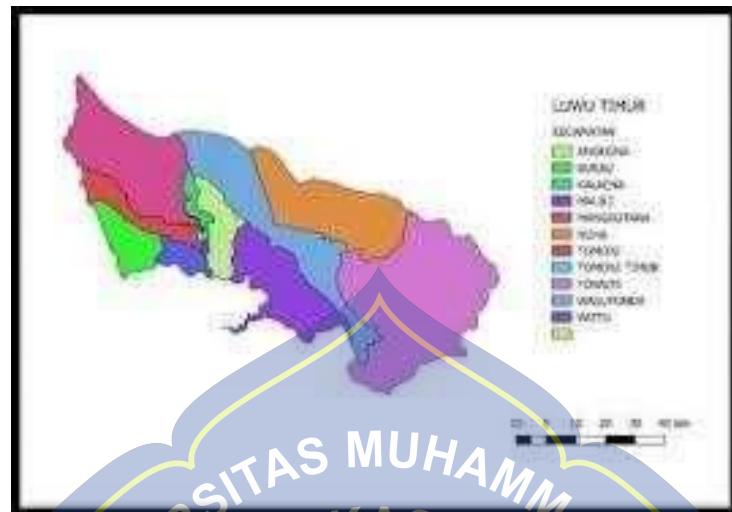
A. Gambaran Umum

1. Lokasi Penelitian Luwu Timur

Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, yang secara historis dan administratif merupakan wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Luwu. Lahirnya Kabupaten Luwu Timur tidak dapat dilepaskan dari dinamika kebijakan otonomi daerah yang mulai bergulir sejak era reformasi tahun 1998. Reformasi tersebut menjadi titik balik penting dalam sistem pemerintahan Indonesia, di mana salah satu implikasi utamanya adalah pelaksanaan desentralisasi melalui pemberian kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.

Dalam konteks tersebut, Luwu Timur resmi menjadi kabupaten tersendiri pada tanggal 25 Februari 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003. Pemekaran ini merupakan hasil dari aspirasi masyarakat di wilayah timur bekas Kabupaten Luwu yang menginginkan pemerataan pembangunan dan akses layanan publik yang lebih dekat. Sejak saat itu, Luwu Timur menjadikan Malili sebagai ibu kota kabupaten dan secara administratif membawahi sejumlah kecamatan, desa, dan kelurahan. Dalam perjalannya, kabupaten ini mengalami

perkembangan yang cukup pesat, khususnya dalam bidang pertambangan, perkebunan, perikanan, dan pembangunan infrastruktur, yang secara langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi wilayah.



Secara geografis, Kabupaten Luwu Timur terletak di bagian timur Provinsi Sulawesi Selatan, dengan jarak kurang lebih **550 kilometer** dari ibu kota provinsi, **Makassar**. Letak astronomis wilayah ini berada antara **$2^{\circ}34'45'' - 3^{\circ}30'30''$ Lintang Selatan** dan **$120^{\circ}21'15'' - 121^{\circ}43'11''$ Bujur Timur**. Kondisi geografis ini memberikan Luwu Timur keunggulan strategis, karena berbatasan langsung dengan Teluk Bone di sisi timur dan memiliki akses ke wilayah pegunungan, pesisir, serta perairan danau. Beragamnya bentang alam tersebut turut menopang kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, mulai dari hasil tambang seperti nikel, hingga hasil pertanian dan perkebunan seperti kelapa sawit, kakao, dan merica.

Dari aspek sosial dan ekonomi, masyarakat Luwu Timur sebagian besar hidup dari sektor agraris, dengan dominasi pekerjaan di bidang pertanian, perikanan, dan perkebunan. Namun demikian, kehadiran industri ekstraktif, khususnya di sektor pertambangan, juga telah memberi dampak terhadap struktur ekonomi dan sosial masyarakat. Hal ini menjadikan Luwu Timur sebagai kawasan

yang kompleks dan dinamis, di mana pembangunan ekonomi harus diselaraskan dengan pelestarian lingkungan serta penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat lokal.

Pemilihan Kabupaten Luwu Timur, khususnya Desa Bantilang sebagai lokasi penelitian, didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar, namun di sisi lain juga menghadapi tantangan dalam aspek pemberdayaan ekonomi desa. Desa Bantilang dikenal memiliki komoditas unggulan berupa lada (merica), yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Namun pengelolaan hasil pertanian tersebut masih didominasi oleh pola tradisional dan ketergantungan pada tengkulak, sehingga nilai tambah yang diterima oleh masyarakat masih tergolong rendah. Dalam konteks inilah, BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa memiliki peran sentral untuk meningkatkan nilai ekonomi lokal dan memperkuat struktur ekonomi desa secara berkelanjutan.

Dengan demikian, lokasi penelitian ini sangat relevan untuk mengkaji bagaimana optimalisasi peran dan fungsi BUMDes dapat dilakukan secara strategis, dalam rangka memperkuat ekonomi desa dan mendorong kemandirian masyarakat di tengah dinamika pembangunan wilayah yang terus berkembang.

2. Desa Bantilang

Desa Bantilang merupakan salah satu wilayah administratif yang terletak di Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Secara geografis, desa ini berada di sisi timur Danau Towuti, dan telah lama menjadi pusat aktivitas sosial-ekonomi masyarakat lokal. Sejak zaman dahulu, wilayah Bantilang dikenal

sebagai pemukiman masyarakat agraris dan pesisir, di mana sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dari hasil hutan, pertanian, dan perikanan darat. Pola hidup masyarakat yang dekat dengan alam menjadikan hubungan antara manusia dan sumber daya alam di desa ini bersifat sangat erat dan saling bergantung.

Dalam perjalannya, sektor perkebunan lada (merica) mengalami perkembangan yang signifikan dan kini menjadi komoditas unggulan serta tulang punggung perekonomian masyarakat Desa Bantilang. Lada bukan hanya sekadar hasil pertanian, tetapi telah menjadi identitas ekonomi dan simbol ketahanan lokal desa. Komoditas ini memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar domestik maupun ekspor, yang menjadikannya sebagai sumber pendapatan utama bagi mayoritas rumah tangga di wilayah tersebut.

Berdasarkan data yang tersedia, luas areal perkebunan lada di Desa Bantilang mencapai sekitar 4.239,8 hektar, dengan total produksi tahunan sebesar 24.544 ton. Angka ini mencerminkan kapasitas produksi yang besar dan berpotensi memberikan kontribusi ekonomi signifikan bagi pembangunan desa. Secara estimatif, nilai ekonomi dari sektor perkebunan lada tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp 1,16 triliun per tahun. Nilai tersebut tidak hanya menggambarkan besarnya volume produksi, tetapi juga menunjukkan potensi desa dalam menopang pembangunan ekonomi berbasis komoditas unggulan.

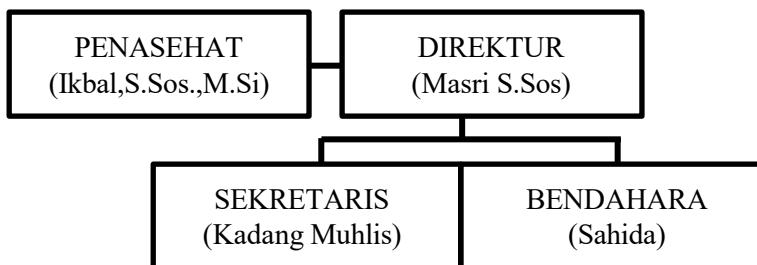
Perkebunan lada di Desa Bantilang telah menjadi sumber penghidupan tidak hanya bagi masyarakat lokal, tetapi juga bagi pekerja dari luar desa yang terlibat dalam berbagai aktivitas produksi—mulai dari pembukaan lahan, penanaman,

pemeliharaan, panen, hingga distribusi. Dengan demikian, sektor ini juga membuka peluang kerja dan mobilitas ekonomi antardaerah, yang berdampak pada meningkatnya interaksi sosial dan ekonomi di tingkat lokal maupun regional.

Namun demikian, potensi besar yang dimiliki Desa Bantilang juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi pemerintah desa, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya secara efektif, berkelanjutan, dan inklusif. Salah satu isu utama adalah bagaimana mengelola komoditas strategis ini secara kolektif dan produktif, agar nilai tambah dari lada tidak hanya dinikmati oleh pihak luar (seperti tengkulak atau perantara), melainkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam konteks ini, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi sangat penting sebagai lembaga ekonomi lokal yang memiliki mandat untuk mengelola potensi desa secara profesional dan akuntabel. Dengan dukungan kelembagaan yang kuat dan partisipasi masyarakat, BUMDes diharapkan mampu mengambil peran strategis dalam hilirisasi produk lada, memperkuat sistem tata niaga, serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Oleh sebab itu, Desa Bantilang menjadi lokasi yang tepat untuk mengkaji bagaimana optimalisasi pelaksanaan peran dan fungsi BUMDes dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan dan berbasis pada kekuatan lokal.

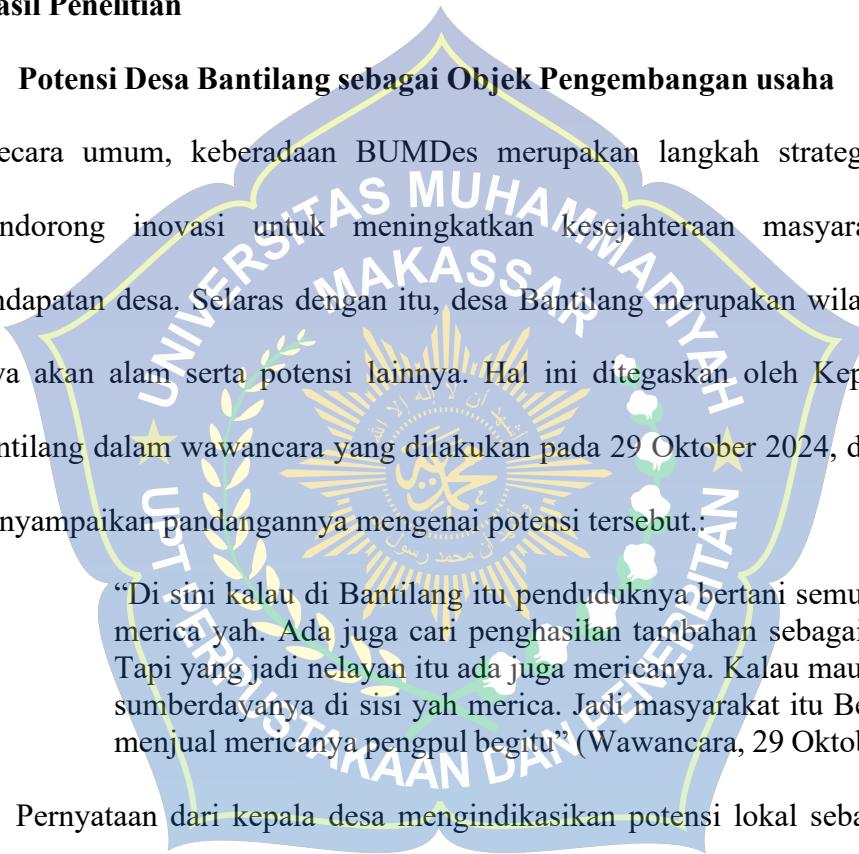
3. Struktur organisasi BUMDes Harapan Jaya Desa Bantilang



B. Hasil Penelitian

1. Potensi Desa Bantilang sebagai Objek Pengembangan usaha

Secara umum, keberadaan BUMDes merupakan langkah strategis dalam mendorong inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa. Selaras dengan itu, desa Bantilang merupakan wilayah yang kaya akan alam serta potensi lainnya. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Desa Bantilang dalam wawancara yang dilakukan pada 29 Oktober 2024, di mana ia menyampaikan pandangannya mengenai potensi tersebut.:

“Di sini kalau di Bantilang itu penduduknya bertani semua, bertani merica yah. Ada juga cari penghasilan tambahan sebagai nelayan. Tapi yang jadi nelayan itu ada juga mericanya. Kalau mau di bilang sumberdayanya di sisi yah merica. Jadi masyarakat itu Bertani dan menjual mericanya pengpul begitu” (Wawancara, 29 Oktober 2024)

Pernyataan dari kepala desa mengindikasikan potensi lokal sebagai basis pengembangan ekonomi desa. Dominasi pertanian merica sebagai sumber penghidupan utama masyarakat menunjukkan bahwa Desa Bantilang telah mengidentifikasi komoditas unggulan yang dapat menjadi dasar pembentukan dan

pengembangan unit usaha BUMDes.

IL juga mengungkapkan inisiatif pengembangan sektor pariwisata:

“Pemerintah desa upayakan itu kemarin Pulau Wasobonti untuk jadi tempat wisata. Alhamdulillah dari tahun kemarin sudah selesai. Kalau ini bisa kita maksimalkan lagi tentu masyarakat punya peluang ekonomi di situ.” Pungkasnya

Pemerintah Desa Bantilang telah menginisiasi strategi pembangunan yang diarahkan pada kemandirian ekonomi desa melalui diversifikasi sektor, dari pertanian ke pariwisata. Salah satu wujud implementasinya adalah pengembangan Pulau Wasobonti sebagai kawasan wisata baru. Dimana langkah ini menekankan pentingnya *policy resources, implementing agency*, serta kondisi sosial-politik dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Pemerintah desa sebagai aktor implementasi telah menyediakan infrastruktur dasar, yang merupakan bentuk konkret dari penyediaan sumber daya dan komitmen birokrasi untuk mengubah arah pembangunan ekonomi masyarakat.

Diversifikasi ini membawa peluang baru bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang lebih variatif dan berbasis potensi lokal. Usaha kuliner, transportasi air, jasa pemandu wisata, serta kerajinan tangan mulai muncul sebagai bentuk ekonomi alternatif. Fenomena ini mencerminkan munculnya inisiatif dari masyarakat sebagai *target group* dalam model Van Meter dan Van

Horn, yang menunjukkan adanya perubahan perilaku akibat kebijakan yang diimplementasikan. Di sisi lain, strategi ini juga mencerminkan prinsip optimalisasi sebagaimana dijelaskan oleh Mahcfud Siddiq, yakni bagaimana desa memanfaatkan sumber daya yang sudah ada untuk memperoleh hasil yang maksimal tanpa harus bergantung pada modal besar dari luar.

Perspektif lain datang dari RA pelaku UMKM di Desa Bantilang. Wawancara dengan Ramasia, memberikan gambaran nyata tentang bagaimana potensi masyarakat desa dalam bidang ekonomi sebenarnya sangat menjanjikan dimana menyebutkan :

Tidak susah dibilang orang-orang di sini kreatif, terutama itu ibu-ibu rata-rata main facebook mi. Kuliat itu na asal na poting di facebook jualannya sebentar ji na habis mi biar apana jual. Cuma kita ini terbatas ki di sini karena harus pki meyebrang danau kalau mauki jual jualanta keluar, sedikit ji didapat kalau disini jki menjual berapa ji penduduknya toh. (28 oktober 2024)

Ramasia menjelaskan bahwa masyarakat, terutama kalangan ibu-ibu, memiliki kreativitas tinggi dalam memasarkan produk mereka melalui media sosial seperti Facebook. Produk yang mereka tawarkan cepat laku hanya dengan mengandalkan unggahan sederhana di media sosial, menunjukkan adanya kemampuan adaptasi teknologi dan semangat usaha yang kuat. Fenomena ini mencerminkan tumbuhnya ekonomi kreatif berbasis digital di tingkat akar rumput, yang sejalan dengan tujuan pengembangan masyarakat dalam teori pembangunan desa.

Namun, Ramasia juga mengungkapkan kendala utama yang dihadapi oleh masyarakat, yaitu keterbatasan geografis. Desa Bantilang, yang secara fisik terisolasi karena harus menyeberangi danau untuk menjual barang ke luar,

menjadikan akses pasar sangat terbatas. Masyarakat hanya dapat menjual produk dalam lingkup desa yang kecil, yang tentu saja berimbas pada minimnya penghasilan karena jumlah penduduk yang menjadi konsumen juga terbatas. Ini menunjukkan bahwa meskipun potensi sumber daya manusia cukup tinggi, dukungan infrastruktur dan sistem distribusi masih sangat lemah.

2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Desa Bantilang merupakan salah satu wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang potensial, terutama pada sektor pertanian dengan komoditas unggulan berupa merica. Berdasarkan data desa, luas areal perkebunan merica mencapai lebih dari 4.000 hektar dengan tingkat produksi tahunan yang mampu menembus puluhan ribu ton. Nilai ekonominya semakin signifikan mengingat harga jual rata-rata komoditas tersebut mencapai sekitar Rp140.000 per kilogram. Merica yang dihasilkan masyarakat Bantilang terbagi dalam dua jenis, yakni *black pepper* (lada hitam) dan *white pepper* (lada putih), masing-masing memiliki keunggulan serta segmen pasar tersendiri baik di tingkat domestik maupun internasional.

Selain sektor perkebunan, potensi perikanan darat di wilayah ini juga tidak kalah menjanjikan. Ikan pangkilang, yang merupakan hasil khas dari Danau Towuti, telah lama menjadi sumber penghidupan masyarakat lokal, khususnya bagi kelompok nelayan. Tingginya permintaan pasar membuat harga ikan pangkilang mencapai Rp100.000 per kilogram, sehingga menambah kontribusi signifikan terhadap perekonomian rumah tangga.

Potret ini menunjukkan bahwa sektor pertanian dan perikanan bukan hanya berperan sebagai penopang ekonomi keluarga, tetapi juga memiliki

peluang besar untuk dikembangkan sebagai basis pembangunan ekonomi desa secara lebih luas. Dengan kata lain, komoditas unggulan seperti merica dan hasil perikanan Danau Towuti dapat diposisikan sebagai pilar utama pembangunan desa apabila dikelola dengan strategi yang terarah, berkelanjutan, dan berbasis pada pemberdayaan Masyarakat.

Kreativitas lahir dari kelompok ibu-ibu yang tergabung dalam PKK dalam mengelola hasil sumber daya alam dimana dari wawancara pada 31 Oktober 2024, KI selaku Ketua PKK Desa Bantilang, menyampaikan:

“Kami dari PKK kami tekankan untuk ibu-ibu di sini melakukan yang namanya ekonomi mandiri, nah di sini supaya ada kegiatan positifnya ibu-ibu. Jadi ekonomi mandiri itu kami ciptakan produk dari sumber daya yang ada di sini. Seperti ikan buttini yang dijadikan abon, atau ikan pangkilang yang dijadikan keripik dan alhamdulillah ini juga bisa angkat namanya Desa Bantilang dan sudah sampai di tingkat provinsi.”(Wawancara, 31 Oktober 2024)



Gambar 2 : Hasil Keratifitas PKK desa Bantilang mengelola ikan pangkilang

Dari pernyataan KI adanya semangat kemandirian ekonomi khususnya di kalangan perempuan desa. Inisiatif yang dijalankan oleh kelompok PKK tersebut merupakan bentuk konkret dari kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya lokal secara produktif. Pengolahan ikan lokal seperti ikan pangkilang menjadi keripik mencerminkan adanya kapasitas adaptif dan inovatif dari masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya perikanan yang tersedia.

Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk aktivitas ekonomi rumah tangga, tetapi juga sebagai strategi peningkatan nilai tambah terhadap hasil perikanan yang sebelumnya hanya dikonsumsi secara langsung atau dijual dalam bentuk mentah. Transformasi produk ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap pentingnya proses hilirisasi komoditas lokal guna meningkatkan daya saing produk di pasar. Lebih jauh, keberhasilan produk-produk tersebut hingga dikenal di tingkat provinsi mencerminkan bahwa masyarakat desa, melalui kolaborasi dan pengorganisasian kelompok seperti PKK, mampu menciptakan produk yang berdaya saing tinggi.

Optimalisasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara maksimal tanpa harus mengandalkan penambahan modal besar. Dalam konteks ini, BUMDes menjadi pengelola formal atas usaha ekonomi rumah tangga yang telah berjalan. namun BUMDes dalam hal ini tidak mampu untuk menjadi perpanjangan tangan dari pengelolaan sumberdaya yang ada di desa Bantilang. Hal ini dijelaskan lebih lanjut

dalam wawancara bersama KI. Dimana dalam lanjutan wawancaranya menyebutkan:

Saat ini pengelolaan ekonomi kreatif kami dari PKK yang hendel karena BUMDes di Desa Bantilang bisa dikatakan kurang aktif baik secara struktural maupun pengelolaan. Tapi kami juga tetap mendorong BUMDes supaya bisa menjadi pengelola secara resmi aset desa yang kita punya ini. Pungkasnya

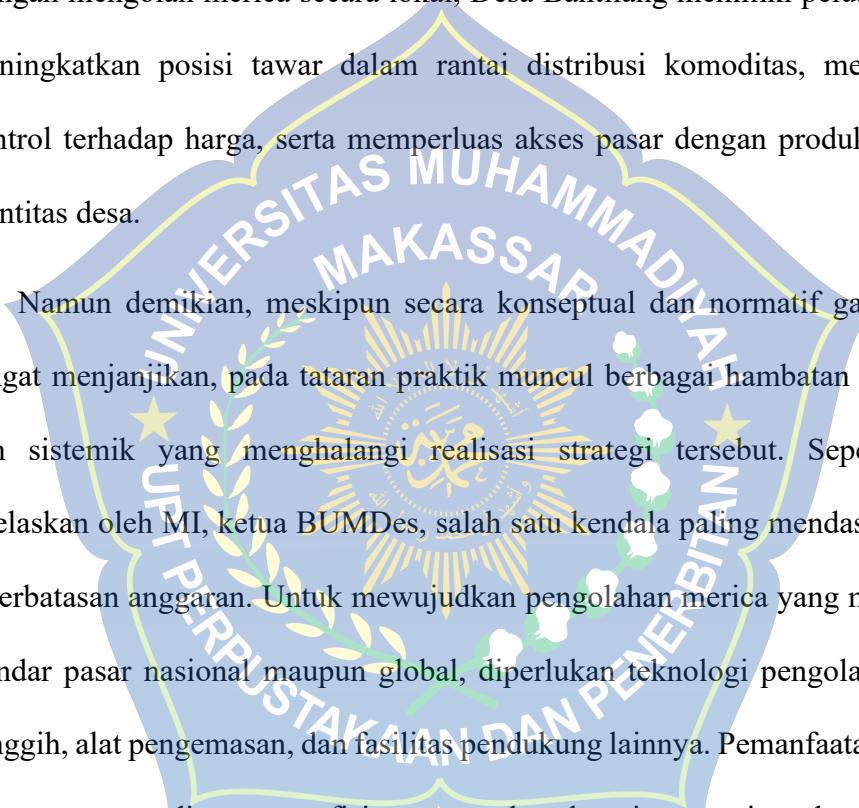
Menurut KI, salah satu akar permasalahan yang terjadi adalah kekosongan kepemimpinan dalam struktur BUMDes itu sendiri. Hingga saat ini, BUMDes Desa Bantilang belum memiliki pengurus aktif atau sistem manajerial yang berjalan. Ketiadaan pemimpin yang mampu merumuskan arah strategis dan mengeksekusi program secara terstruktur menyebabkan potensi-potensi ekonomi lokal, seperti inisiatif ibu PKK, belum mendapatkan dukungan institusional yang memadai. Lebih lanjut, kondisi ini diperburuk oleh fokus kebijakan ekonomi desa yang cenderung terpusat pada satu komoditas utama, yakni merica seperti yang disebutkan kepala desa sebelumnya. Meskipun sektor pertanian merica memang menjadi tumpuan ekonomi sebagian besar masyarakat, fokus tunggal ini telah menyebabkan terabaikannya sektor-sektor alternatif seperti perikanan dan ekonomi kreatif rumah tangga.

Peran BUMDes masih menjadi pertanyaan besar terutama yang berkaitan dengan aktifitasnya ditengah masyarakat. Hal ini direspon langsung oleh ketua BUMDes desa Bantilang sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh MI dalam wawancaranya menyebutkan :

“Program yang kami rencanakan sebenarnya bagaimana merica itu tidak Cuma di jual mentah keluar, tapi dikemas di sini dijadikan bahan baku dan dilempar keluar. Tapi yang jadi kendala

anggarannya untuk adakan alat. Kalau mau pengadaan alat itu besar sekali dek". (Wawancara, 2 November 2024)

Untuk mengelola komoditas merica secara mandiri yakni dengan mengolahnya menjadi produk setengah jadi atau jadi, bukan sekadar menjual dalam bentuk mentah merupakan representasi dari visi strategis pembangunan ekonomi desa yang lebih berorientasi jangka panjang. Pendekatan ini menekankan pentingnya penciptaan nilai tambah pada setiap tahapan produksi. Dengan mengolah merica secara lokal, Desa Bantilang memiliki peluang untuk meningkatkan posisi tawar dalam rantai distribusi komoditas, memperkuat kontrol terhadap harga, serta memperluas akses pasar dengan produk berlabel identitas desa.



Namun demikian, meskipun secara konseptual dan normatif gagasan ini sangat menjanjikan, pada tataran praktik muncul berbagai hambatan struktural dan sistemik yang menghalangi realisasi strategi tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh MI, ketua BUMDes, salah satu kendala paling mendasar adalah keterbatasan anggaran. Untuk mewujudkan pengolahan merica yang memenuhi standar pasar nasional maupun global, diperlukan teknologi pengolahan yang canggih, alat pengemasan, dan fasilitas pendukung lainnya. Pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efisien merupakan kunci tercapainya kemandirian. Namun, ketika BUMDes tidak memiliki akses pendanaan yang memadai, potensi sebesar apapun akan sulit dioptimalkan. Ketiadaan fasilitas produksi membuat gagasan hilirisasi hanya menjadi wacana tanpa implementasi.

Selaras dengan ketua BUMDes KM selaku sekretaris ikut bersuara dalam menanggapi kondisi yang terjadi ditubuh BUMDes desa bantilang. Beberapa hambatan dijelaskan KM melalui wawancaranya

“ Memang kalau memungkinkan itu merica bisa diolah sendiri, bagus sekali. Saya terangkan mi dek BUMDes tidak bisa terlalu banyak bergerak karena orang disini lebih banyak masuk perusahaan tambang dibandingkan mau kelola merica apalagi mau buat usaha kreatif. Jadi susah i akomodir nya” (Wawancara, 2 November 2024)

Pernyataan KM mencerminkan dinamika yang kompleks dalam proses peningkatan pendapatan. Ia mengungkapkan bahwa meskipun Desa Bantilang memiliki potensi besar dalam pengolahan komoditas lokal seperti merica, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan usaha desa sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan masyarakat yang lebih memilih bekerja di sektor pertambangan. Kondisi ini mencerminkan pergeseran orientasi ekonomi masyarakat dari sektor agraris dan usaha kreatif lokal ke sektor ekstraktif yang bersifat individual dan berorientasi jangka pendek. Fenomena ini menjadi cerminan langsung dari lemahnya implementasi kebijakan pembangunan desa, di mana instrumen kelembagaan seperti BUMDes tidak mampu menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat secara kontekstual.

Rendahnya partisipasi masyarakat jika dilihat melalui teori partisipasi Cohen dan Uphoff, yang membagi partisipasi dalam empat aspek: pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Dalam kasus ini, masyarakat Desa Bantilang tampaknya belum diberi ruang atau motivasi yang cukup untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan ekonomi desa, terutama dalam pengembangan BUMDes. Kurangnya sosialisasi, kepemimpinan yang lemah, dan

dominasi pekerjaan tambang membuat partisipasi masyarakat hanya terbatas pada kegiatan ekonomi individu. Padahal, pembangunan desa yang berkelanjutan mensyaratkan adanya partisipasi kolektif dan pemberdayaan masyarakat dalam semua tahap kebijakan. Ketiadaan partisipasi ini semakin memperlemah struktur BUMDes sebagai pilar penggerak ekonomi desa.

Dalam lanjutan wawancaranya, KM juga menegaskan bahwa :

“Saya juga kalau bisa pergi juga menambang saya pergi dek, apalah kita kasihan ini kalau gaji ji diharap di sini dibanding kalau gaji di perusahaan.” Pungkasnya

Pernyataan KM menggambarkan realitas ekonomi yang dihadapi tidak hanya oleh masyarakat Desa Bantilang, tetapi juga oleh aparatur desa itu sendiri. Ketika kegiatan ekonomi local seperti pertanian atau usaha kreatif desa tidak mampu menjamin kestabilan penghasilan, maka wajar jika orientasi masyarakat bergeser ke sektor-sektor yang dianggap lebih menjanjikan secara finansial, seperti pertambangan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa sumber daya lokal, meskipun melimpah dan potensial, belum berhasil dikelola secara produktif untuk mendukung ketahanan ekonomi desa. Optimalisasi dalam hal ini menunjukkan kegagalan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara maksimal untuk stabilitas ekonomi atau peningkatan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sektor luar.

Dalam konteks Desa Bantilang, upaya optimalisasi seharusnya difokuskan pada sektor-sektor yang berbasis potensi lokal seperti budidaya merica yang sudah menjadi identitas ekonomi desa serta industri rumah tangga berbasis pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Akan tetapi, keberhasilan strategi ini sangat

bergantung pada dua faktor utama: keterlibatan masyarakat dan dukungan kelembagaan yang kuat. Tanpa partisipasi aktif dari warga desa dalam kegiatan ekonomi kolektif dan tanpa BUMDes yang berfungsi secara efektif sebagai motor penggerak, upaya optimalisasi akan berhenti pada tataran wacana.

Lebih jauh, ketahanan ekonomi lokal, yang merupakan fondasi dari ketahanan ekonomi nasional, tidak mungkin tercapai tanpa adanya sinergi antara sumber daya, kelembagaan, dan partisipasi sosial. Hal ini menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam seluruh tahapan Pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan hasil. Sayangnya, apa yang disampaikan Kadang Muhlis mencerminkan belum terbangunnya integrasi tersebut di Desa Bantilang. Potensi desa belum diikuti dengan sistem pendukung yang kuat, baik dari sisi kelembagaan BUMDes maupun sistem insentif yang mendorong masyarakat untuk terlibat.

Akibatnya, posisi ekonomi desa dalam struktur ekonomi nasional tetap berada dalam situasi yang rapuh dan bergantung pada sektor luar, seperti pertambangan, yang meskipun menjanjikan penghasilan cepat, tetapi berisiko tinggi secara sosial dan ekologi. Hal ini menjadi tantangan strategis yang harus direspon secara serius oleh pemerintah desa dan stakeholder terkait. BUMDes tidak hanya harus direvitalisasi dalam struktur dan manajemennya, tetapi juga perlu diposisikan ulang sebagai platform kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku ekonomi lokal.

3. Tersedianya Lapangan Kerja Baru

Salah satu peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah menciptakan lapangan kerja baru melalui pengelolaan potensi lokal yang dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan. Peran ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi memiliki dimensi ekonomi, sosial, dan kultural yang saling berkaitan. Dalam konteks Desa Bantilang, potensi lokal sebenarnya sangat besar, terutama dari sektor pertanian, dengan komoditas unggulan berupa merica yang telah menjadi bagian dari identitas ekonomi masyarakat. Secara teoritis, komoditas ini memiliki prospek tinggi untuk dikembangkan dalam bentuk hilirisasi produk maupun diversifikasi usaha berbasis hasil pertanian.

Pergeseran orientasi ekonomi masyarakat ke sektor tambang dapat dilihat sebagai bentuk kegagalan meningkatkan pendapatan masyarakat maupun desa dalam menyediakan alternatif ekonomi yang layak dan menarik. Pilihan masyarakat terhadap sektor tambang tidak semata-mata karena rendahnya apresiasi terhadap potensi lokal, tetapi lebih kepada ketiadaan sistem ekonomi lokal yang mampu bersaing dari segi insentif, keberlanjutan, dan akses pasar.

NN, salah satu staf kantor Desa Bantilang, menyampaikan pandangan yang menarik terkait kecenderungan masyarakat yang lebih memilih bekerja di sektor pertambangan..

“di sini. merica juga ada waktu musimnya baru bisa dipetik, pertanyaanya toh kalau belum musim apa mau di pake belanja? Apa mau di jual ? makanya anak-anak muda itu lebih na pilih keluar . Begitu lah” (Wawancara 2 November 2024)

Pernyataan NN menggambarkan dilema struktural masyarakat desa dalam memilih antara sektor pertanian dan sektor pertambangan. Keterikatan masyarakat terhadap hasil pertanian, khususnya komoditas merica, sangat bergantung pada siklus musim panen yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu dalam setahun. Ketika musim panen belum tiba, tidak tersedia mekanisme

pendapatan alternatif yang memadai, sehingga masyarakat menghadapi kekosongan ekonomi yang signifikan. Realitas ini menjadi permasalahan utama bagi rumah tangga yang memiliki kebutuhan konsumsi harian dan pengeluaran rutin. Oleh karena itu, sektor pertambangan yang menawarkan penghasilan yang lebih rutin dan dapat diakses kapan saja menjadi pilihan rasional dalam memenuhi kebutuhan ekonomi jangka pendek.

Selain dari faktor ekternal, tersedianya lapangan baru melalui hilirisasi hasil tanaman mendapat tantangan tersendiri, sebagaimana tantangan yang dihadapi adalah dominasi pembeli besar dari luar desa juga yang menentukan harga dan volume pembelian, sehingga petani tidak memiliki posisi tawar yang kuat. Seperti yang dikatakan oleh AS selaku petani merica dalam wawancaranya menjelaskan:

“Susah kalau pemerintah desa atau BUMDes mau jadikan sebagai produk karena tidak sanggup. Tidak ada juga ceritanya itu pemerintah bisa atur-atur harga karena bos-bos luar yang tentukan makanya banyak juga pembeli merica sebelumnya habis karena tidak bisa penuhi permintaan bos.”(Wawancara, 4 November 2024)

Pernyataan AS menyebutkan ketidakmampuan pemerintah desa maupun BUMDes untuk mengatur harga, serta ketergantungan pada "bos-bos luar" sebagai penentu harga dan volume pembelian, menegaskan lemahnya posisi tawar. Dalam konteks ini pelaksanaan kebijakan atau program desa yang baik membutuhkan kemampuan birokrasi desa untuk mentransformasikan visi kemandirian ekonomi ke dalam tindakan yang konkret dan terstruktur. Ketidakmampuan tersebut mencerminkan belum optimalnya jaringan pelaksana dan lemahnya proses implementasi di tingkat desa.

Di sinilah fungsi strategis BUMDes tidak hadir sebagai lembaga yang bukan hanya mengelola potensi desa, tetapi juga melindungi kepentingan ekonomi masyarakat dari dominasi eksternal serta menciptakan peluang lapan kerja.

Di sisi lain, seperti yang disinggung oleh AS dalam wawancaranya, tantangan pengolahan merica tidak hanya datang dari dalam (keterbatasan SDM dan dana), tetapi juga dari faktor eksternal, khususnya struktur pasar yang timpang. Relasi kuasa dalam rantai distribusi di mana harga, volume pembelian, hingga akses pasar dikendalikan oleh pihak luar atau "bos" pengepul besar membuat petani dan produsen lokal berada dalam posisi yang sangat lemah. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi lapangan kerja tidak cukup hanya dengan niat baik dan rencana strategis, tetapi memerlukan intervensi kelembagaan yang kuat dan sistemik. Teori implementasi Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan bergantung pada koordinasi aktor pelaksana, alokasi sumber daya, serta kondisi sosial ekonomi target group.

Adapun pemahaman dan rancangan BUMDes dalam mengelola lada mendapat kritikan dari Saida selaku masyarakat desa Bantilang, Saida dalam wawancaranya menuturkan:

“Kalau mau adakan alat untuk olah merica jadi bahan jadi kuyakin tidak ada yang bisa pake apalagi orang tua. Semua orang sibuk di kebun masing-masing pasti nah itu sebenarnya jadi tantangan juga.”

Kritik yang disampaikan oleh Saida secara tidak langsung mencerminkan tantangan fundamental yang dihadapi Desa Bantilang dalam proses industrialisasi komoditas lokal. Ia menyoroti bahwa kehadiran alat produksi meskipun secara teknis diperlukan tidak serta-merta menjamin keberhasilan upaya pengolahan

pascapanen apabila tidak diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM).

Dalam konteks ini, hambatan yang muncul bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga bersifat struktural dan kultural. Rendahnya literasi teknologi di kalangan masyarakat desa, terutama generasi tua, dan dominasi pola kerja agraris-tradisional yang bersifat musiman dan padat waktu, membuat adopsi terhadap teknologi produksi modern menjadi terhambat secara signifikan.

Lebih jauh, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program pengembangan ekonomi desa sangat bergantung pada *social readiness* dan *human capital*. Dalam terminologi pembangunan, social readiness mengacu pada kesiapan sosial masyarakat dalam menerima, memahami, dan terlibat aktif dalam proses perubahan, termasuk transformasi ekonomi lokal. Sementara itu, penguatan human capital menyangkut peningkatan keterampilan teknis, kapasitas manajerial, serta perubahan pola pikir dari ekonomi berbasis komoditas mentah ke ekonomi berbasis nilai tambah. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan desa tidak boleh terjebak pada pendekatan struktural semata seperti pengadaan alat dan infrastruktur, tetapi juga harus memprioritaskan pendekatan kultural dan edukatif agar masyarakat benar-benar mampu menjadi pelaku utama dalam perubahan ekonomi tersebut.

Wawancara lanjutan bersama SA juga menunjukkan bahwa ia memiliki harapan adanya lapangan kerja yang lebih produktif di masyarakat di Desa Bantilang.

“Kami disini semua tentunya berharap bagaimana merica bisa lebih baik. Semisal kalau dijual yang pake kemasan kan bisa mki tentukan harga, beda kalau dijual mentah orang dari luar tentukan i. Jadi tidak di tau besok harganya naik atau turun. Tapi begitumi tantangannya itu tadi juga kalau mauki olah sendiri toh”. Pungkasnya

Pernyataan tersebut merefleksikan tumbuhnya kesadaran masyarakat Desa Bantilang terhadap pentingnya hilirisasi komoditas sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru. Selama ini, praktik ekonomi yang berlangsung masih bertumpu pada pola *ekstraktif tradisional*, di mana komoditas unggulan seperti merica dijual dalam bentuk mentah (*raw material*) kepada pihak ketiga umumnya pengepul dari luar desa. Pola ini tidak hanya menyebabkan nilai tambah ekonomi tetap rendah di tingkat petani, tetapi juga memperkuat ketergantungan pada mekanisme pasar luar desa yang bersifat tidak stabil dan sering kali tidak adil.

Secara teoritis, kondisi ini menegaskan pentingnya pembangunan berbasis *people-centered development*, yang menekankan bahwa masyarakat bukan hanya sebagai objek, tetapi sebagai subjek pembangunan. Ketika kapasitas dan keterlibatan masyarakat tidak diperkuat, maka alat produksi, infrastruktur, bahkan modal sekalipun, tidak akan mampu mengubah kondisi ekonomi secara signifikan. Keterlibatan masyarakat tidak hanya dibutuhkan dalam pelaksanaan program, tetapi juga sejak tahap perencanaan dan pengambilan keputusan. Tanpa partisipasi yang substantif, BUMDes akan sulit berfungsi sebagai pendorong utama transformasi ekonomi local dan menciptakan lapangan kerja baru.

Konteks *struktur pasar oligopsoni*, di mana pembeli jumlahnya terbatas sementara penjual (petani) sangat banyak, posisi tawar petani menjadi sangat lemah. Harga ditentukan sepihak oleh pengepul atau perantara, sementara petani tidak memiliki akses langsung ke pasar konsumen akhir. Kondisi ini menciptakan asimetri informasi dan distribusi nilai yang timpang dalam rantai pasok. Sebagai akibatnya, meskipun merica merupakan sumber pendapatan utama bagi masyarakat

Desa Bantilang, komoditas tersebut belum mampu menjamin peningkatan pendapatan yang signifikan atau keberlanjutan kesejahteraan rumah tangga petani.

Dalam kerangka menciptakan lapangan kerja, hilirisasi bukan hanya soal proses teknis pengolahan pascapanen, melainkan juga bagian dari strategi kemandirian ekonomi lokal. Hilirisasi memungkinkan masyarakat memperoleh nilai tambah melalui pengolahan, pengemasan, branding produk, serta akses langsung ke pasar yang lebih luas. Pendekatan ini sejalan dengan teori *value chain* oleh Michael Porter, yang menekankan bahwa peningkatan daya saing suatu produk sangat bergantung pada seberapa jauh pelaku ekonomi lokal menguasai rantai nilai dari hulu ke hilir.

Wawancara ini menegaskan bahwa tantangan dalam pengembangan ekonomi lokal di Desa Bantilang tidak hanya bersumber dari persoalan teknis seperti keterbatasan modal atau minimnya fasilitas produksi, melainkan juga berakar pada faktor sosial dan budaya kerja yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Hambatan kultural ini terlihat dari pola orientasi tenaga kerja desa yang lebih memilih sektor pertambangan dibandingkan keterlibatan dalam program-program BUMDes. Hal ini mencerminkan adanya pergeseran nilai dan preferensi ekonomi masyarakat dari sektor agraris berbasis kolektif ke sektor ekstraktif yang bersifat individual dan jangka pendek. Pernyataan Kadang Muhlis, sekretaris BUMDes, secara eksplisit menegaskan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat menjadi penghalang utama dalam menjalankan fungsi BUMDes secara optimal.

Dalam konteks dikemukakan oleh Mahcfud Siddiq (2001), pembangunan lapangan kerja seharusnya bertumpu pada pemanfaatan sumber daya lokal yang

ada baik alam maupun manusia secara maksimal, tanpa harus bergantung pada investasi modal besar dari luar. Namun, optimalisasi tidak dapat dicapai hanya dengan mengenali potensi lokal semata. Diperlukan kesiapan sumber daya manusia dalam bentuk keterampilan, pengetahuan, serta kemauan untuk terlibat dalam proses pembangunan ekonomi. Selain itu, kelembagaan desa seperti BUMDes harus memiliki struktur yang kuat, mampu melakukan manajemen usaha yang akuntabel, serta memiliki kapasitas untuk membangun kemitraan ekonomi yang strategis.

4. Pemberian akses masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi lokal

Sebagai lembaga yang bertugas mengelola kegiatan usaha di tingkat desa, BUMDes memiliki peran strategis dalam membuka akses bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam aktivitas ekonomi lokal. Namun, di Desa Bantilang, peran ini belum terlaksana secara maksimal. Masyarakat masih belum memperoleh ruang yang memadai untuk berperan dalam berbagai unit usaha BUMDes, baik sebagai pelaksana, pengelola, maupun penerima manfaat secara langsung. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti rendahnya kapasitas manajerial BUMDes, keterbatasan anggaran operasional, serta kurangnya pelatihan dan pendampingan kewirausahaan, yang semuanya berdampak pada minimnya keterlibatan masyarakat secara luas.

Ketiadaan struktur organisasi yang solid dalam tubuh BUMDes juga mencerminkan konsekuensi dari rendahnya partisipasi warga desa, yang lebih memilih untuk fokus pada pekerjaan individu seperti bertani dan bekerja di sektor pertambangan. Bukan hanya kurangnya tenaga kerja yang bersedia mengelola unit

usaha, tetapi juga absennya waktu luang, dorongan motivasional, dan dukungan sosial untuk berkontribusi dalam penguatan kelembagaan ekonomi desa. Dengan demikian, ketidakterlibatan warga dalam struktur BUMDes tidak dapat semata-mata dimaknai sebagai bentuk ketidakpedulian, melainkan lebih sebagai cerminan dari tidak tersedianya ruang partisipatif yang didukung secara sistematis. Hal ini sejalan dengan pernyataan SI, salah satu warga Desa Bantilang, yang mengungkapkan bahwa dirinya pernah diajak bergabung dalam kepengurusan BUMDes, namun menolak karena kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan.

“Saya pernah ditanya juga untuk olah bahan mentah katanya , tapi tidak sempat ji. Setiap hari ke ladang, apalagi musim tanam begini. Jadi tidak bisa bagi waktu kalau harus ikut urus-urus BUMDes.”
(Wawancara, 28 Oktober 2024)

Di sisi lain, HA, yang merupakan anggota kelompok ibu PKK, mengungkapkan bahwa partisipasi dalam aktivitas ekonomi lokal lebih banyak dilakukan secara individual dibandingkan melalui wadah resmi seperti BUMDes.

“Saya dengan ibu-ibu biasa buat beberapa produk makanan disini, tapi tidak masuk di BUMDes. Karena BUMDes-nya juga belum jalan betul, dan tidak ada yang datang ajak kerja sama atau bantu jual.” (Wawancara, 31 Oktober 2024)

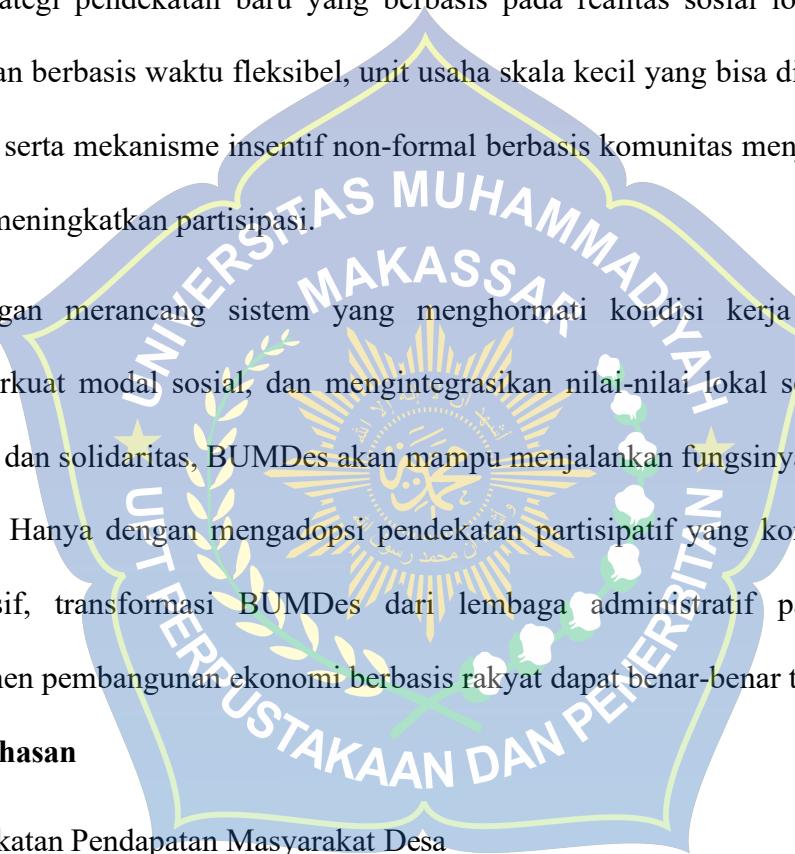
Pernyataan dari Suardi dan Herlina mencerminkan realitas sosial yang kompleks terkait dengan lemahnya fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai katalisator partisipasi ekonomi masyarakat di Desa Bantilang. Meskipun secara normatif BUMDes dirancang sebagai lembaga yang inklusif dan partisipatif, kenyataannya peran tersebut masih bersifat laten belum terejawantahkan dalam sistem yang mampu menjawab kebutuhan konkret dan keterbatasan masyarakat desa. Partisipasi masyarakat masih bersifat pasif dan belum masuk dalam skema kelembagaan yang memungkinkan keterlibatan aktif, karena tidak ada desain

operasional yang adaptif terhadap waktu, tenaga, dan kondisi sosio-ekonomi warga yang umumnya bekerja secara individual atau di sektor informal seperti pertanian substitutif dan tambang.

Dari perspektif partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya berarti keterlibatan fisik atau kehadiran dalam program, tetapi juga mencakup partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, hingga evaluasi. Ketika sistem yang ditawarkan oleh BUMDes belum mampu mengakomodasi waktu kerja masyarakat, apalagi tanpa insentif yang sepadan, maka partisipasi tersebut akan bersifat simbolik dan tidak substansial. Dalam konteks ini, partisipasi gagal tumbuh karena struktur kelembagaan yang tersedia tidak kontekstual dan tidak responsif terhadap dinamika lokal.

Lebih lanjut, dari sudut pandang teori kelembagaan ekonomi (institutional economics), keberhasilan suatu lembaga tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya secara formal, tetapi juga oleh kemampuannya dalam membentuk norma, insentif, dan mekanisme kolaboratif yang dapat menggerakkan aktor-aktor lokal. Ketiadaan skema yang fleksibel dalam BUMDes untuk melibatkan masyarakat desa yang memiliki jam kerja terbatas, minim pelatihan kewirausahaan, serta keterbatasan akses informasi dan teknologi menyebabkan gagalnya pembentukan *trust* dan *sense of belonging* terhadap lembaga tersebut. Dalam hal ini, struktur organisasi BUMDes justru tampak eksklusif dan tidak inklusif, sehingga masyarakat lebih memilih melakukan kegiatan ekonomi secara mandiri tanpa afiliasi kelembagaan.

Kondisi ini menggambarkan bahwa strategi pembangunan ekonomi berbasis komunitas belum berjalan secara utuh di Desa Bantilang. Seharusnya, BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial dan ekonomi yang mendukung inklusivitas. Pendekatan community-based development (CBD) menekankan pentingnya kesesuaian antara desain program dan kebutuhan nyata masyarakat. Maka dari itu, diperlukan redesain struktur BUMDes dan strategi pendekatan baru yang berbasis pada realitas sosial lokal. Program pelatihan berbasis waktu fleksibel, unit usaha skala kecil yang bisa dijalankan dari rumah, serta mekanisme insentif non-formal berbasis komunitas menjadi alternatif untuk meningkatkan partisipasi.



Dengan merancang sistem yang menghormati kondisi kerja masyarakat, memperkuat modal sosial, dan mengintegrasikan nilai-nilai lokal seperti gotong royong dan solidaritas, BUMDes akan mampu menjalankan fungsinya secara lebih efektif. Hanya dengan mengadopsi pendekatan partisipatif yang kontekstual dan responsif, transformasi BUMDes dari lembaga administratif pasif menjadi instrumen pembangunan ekonomi berbasis rakyat dapat benar-benar terwujud.

C. Pembahasan

1. Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa

BUMDes berfungsi sebagai alat kedaulatan ekonomi desa yang memungkinkan masyarakat memperoleh manfaat langsung dari pengelolaan potensi lokal. Dengan kata lain, BUMDes idealnya menjadi instrumen distribusi manfaat ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, di mana keuntungan yang dihasilkan tidak hanya

dinikmati oleh segelintir pihak, melainkan tersebar merata kepada masyarakat desa. Salah satu bentuk konkret dari fungsi tersebut adalah peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya lokal secara produktif.

Di Desa Bantilang, potensi peningkatan pendapatan masyarakat sangat besar, terutama melalui sektor perkebunan lada (merica) yang telah lama menjadi komoditas unggulan. Luas areal perkebunan yang mencapai ribuan hektar dengan produksi tahunan puluhan ribu ton menunjukkan kapasitas ekonomi yang strategis. Namun, kenyataannya hasil panen masyarakat sebagian besar masih dijual dalam bentuk mentah kepada pengepul dari luar desa. Pola ini menyebabkan masyarakat hanya menikmati margin keuntungan yang sangat kecil, sementara nilai tambah dari proses pengolahan, pengemasan, hingga pemasaran justru dinikmati oleh pihak lain di luar desa. Kondisi ini memperlihatkan adanya *missing link* dalam rantai nilai (value chain) yang seharusnya dapat diisi oleh BUMDes sebagai pengelola usaha desa.

Ketiadaan unit usaha pengolahan lada maupun fasilitas pendukung lainnya membuat masyarakat tidak memiliki akses untuk meningkatkan nilai jual produknya. Padahal, apabila BUMDes mampu mengembangkan unit usaha pengolahan pascapanen seperti produksi lada bubuk, minyak atsiri lada, atau diversifikasi produk turunan lainnya, maka peluang peningkatan pendapatan masyarakat akan jauh lebih besar. Dengan adanya

proses hilirisasi di tingkat desa, keuntungan yang dihasilkan tidak hanya meningkat secara signifikan, tetapi juga berpotensi memperluas pasar hingga ke tingkat regional maupun nasional.

Selain itu, keterbatasan modal usaha, rendahnya kapasitas manajerial, dan belum optimalnya dukungan infrastruktur menjadi faktor penghambat utama bagi BUMDes Bantilang dalam menjalankan perannya. Kondisi ini mengakibatkan BUMDes hanya berfungsi secara administratif tanpa mampu berperan nyata dalam mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Padahal, Sutoro Eko menekankan bahwa keberadaan BUMDes bukan sekadar simbol kelembagaan, melainkan harus hadir sebagai motor penggerak ekonomi desa yang memberikan manfaat konkret bagi kesejahteraan warga.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa peran pemberdayaan ekonomi masyarakat justru lebih banyak diambil oleh kelompok swadaya masyarakat, seperti PKK Desa Bantilang, yang telah berhasil mengolah ikan pangkilang menjadi produk olahan bernilai jual tinggi. Keberhasilan kelompok kecil ini menjadi bukti bahwa potensi peningkatan pendapatan sebenarnya dapat dicapai apabila ada dukungan kelembagaan yang kuat. Sayangnya, BUMDes sebagai entitas formal belum mampu mengambil alih atau memperluas skala kegiatan serupa agar dampaknya lebih besar dan merata di masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi BUMDes Bantilang dalam peningkatan pendapatan masyarakat masih jauh dari optimal. Agar fungsi ini berjalan sebagaimana mestinya, diperlukan langkah strategis berupa: (1) penguatan modal dan dukungan infrastruktur yang memadai untuk mendukung usaha produktif; (2) peningkatan kapasitas manajerial pengurus BUMDes melalui pelatihan dan pendampingan; (3) pembangunan unit usaha berbasis pengolahan hasil pertanian dan komoditas unggulan desa; serta (4) pengembangan kemitraan dengan pihak swasta, koperasi, maupun lembaga pemerintah untuk membuka akses pasar yang lebih luas.

2. Tersedianya Lapangan Kerja Baru

Sutoro Eko (2015) menekankan bahwa salah satu fungsi utama BUMDes adalah menciptakan kesempatan kerja dan usaha produktif di desa. Keberadaan BUMDes diharapkan tidak hanya menjadi wadah pengelolaan potensi lokal, tetapi juga sebagai instrumen penggerak ekonomi desa yang mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada sektor luar desa. Dengan terciptanya lapangan kerja baru di tingkat lokal, maka mobilitas penduduk ke luar daerah dapat ditekan, sehingga desa mampu menjaga ketahanan sosial-ekonomi dan mengurangi risiko urbanisasi berlebihan.

Namun, realitas di Desa Bantilang menunjukkan bahwa fungsi ini belum terlaksana secara optimal. Berdasarkan temuan lapangan, hingga saat ini BUMDes Harapan Jaya belum memiliki unit usaha aktif yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan. Kondisi ini menimbulkan

kesenjangan antara harapan normatif sebagaimana diteorikan oleh Sutoro Eko dan kenyataan empiris di lapangan. Sebagian besar masyarakat Desa Bantilang masih lebih memilih bekerja di sektor pertambangan di luar desa yang dinilai lebih menjanjikan secara finansial dibandingkan sektor pertanian lokal yang dikelola secara tradisional. Fenomena ini menunjukkan adanya dualisme orientasi ekonomi masyarakat, di mana sektor pertambangan menjadi daya tarik utama meskipun sektor pertanian memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui kelembagaan BUMDes.



Ketiadaan lapangan kerja baru yang diciptakan BUMDes memperlihatkan lemahnya kapasitas kelembagaan, baik dari segi manajerial maupun pengelolaan potensi lokal. Padahal, potensi yang dimiliki Desa Bantilang sangat besar, terutama dari sektor perkebunan lada dan potensi wisata lokal, yang apabila dikelola secara profesional dapat membuka banyak jenis pekerjaan baru seperti jasa pengolahan hasil pertanian, perdagangan, pariwisata, transportasi lokal, hingga industri kreatif berbasis desa. Sayangnya, potensi tersebut belum dikapitalisasi oleh BUMDes karena minimnya inovasi, keterbatasan modal, serta tidak adanya strategi yang jelas untuk membuka lapangan kerja baru.

Kondisi ini sejalan dengan temuan Muslim et al. (2023) yang menyebutkan bahwa banyak BUMDes di Indonesia mengalami stagnasi karena tidak memiliki strategi optimalisasi yang tepat, sehingga gagal mengembangkan unit usaha yang mampu menyerap tenaga kerja. Dengan demikian, BUMDes

Harapan Jaya Desa Bantilang belum dapat berfungsi sebagai instrumen transformasi ekonomi desa yang diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan peran BUMDes sebagai pencipta lapangan kerja, diperlukan langkah-langkah strategis, antara lain: (1) melakukan identifikasi ulang potensi lokal yang dapat segera dikembangkan menjadi unit usaha produktif; (2) memperkuat kapasitas manajemen BUMDes dengan melibatkan tenaga profesional atau pendamping; (3) membangun kemitraan dengan pihak swasta maupun pemerintah daerah untuk membuka akses permodalan dan pasar; serta (4) mengarahkan program pemberdayaan masyarakat agar selaras dengan kebutuhan unit usaha yang dibentuk BUMDes. Jika langkah-langkah tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten, maka BUMDes Bantilang berpotensi besar untuk menjadi pusat penciptaan lapangan kerja baru di desa, sekaligus menahan laju migrasi masyarakat ke sektor luar desa.

3. Pemberian Akses bagi Masyarakat untuk Terlibat dalam Kegiatan Ekonomi Lokal

BUMDes harus menjadi wadah partisipasi dan kolaborasi warga dalam kegiatan ekonomi desa. Fungsi ini mencerminkan pendekatan inklusif dalam pembangunan desa, di mana seluruh elemen masyarakat dapat terlibat dalam proses produksi dan distribusi ekonomi. Di Desa Bantilang, akses masyarakat terhadap BUMDes masih sangat terbatas. Kelompok masyarakat seperti ibu rumah tangga dan petani sudah memiliki kegiatan ekonomi masing-masing, seperti produksi abon ikan dan keripik, namun kegiatan ini belum

terkonsolidasi secara kelembagaan melalui BUMDes. Tidak adanya sinergi antara BUMDes dan pelaku ekonomi lokal menyebabkan partisipasi masyarakat dalam sistem ekonomi desa menjadi terfragmentasi. Oleh karena itu, fungsi BUMDes sebagai penyedia akses partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi lokal belum berjalan secara optimal. Ini berbanding terbalik dengan gagasan Sutoro Eko yang memandang BUMDes sebagai instrumen demokratisasi ekonomi di tingkat desa.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai optimalisasi pelaksanaan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bantilang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, dapat disimpulkan bahwa keberadaan BUMDes memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi desa. Pemanfaatan potensi lokal, khususnya pada sektor pertanian komoditas unggulan berupa merica, telah menjadi dasar utama dalam pengembangan usaha desa. Meskipun demikian, pelaksanaan fungsi BUMDes masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, pengelolaan manajerial yang belum maksimal, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat secara menyeluruh.

Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes Bantilang telah berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, meskipun perannya belum sepenuhnya optimal. Dengan penguatan kapasitas kelembagaan, transparansi pengelolaan, serta peningkatan kerja sama antara pemerintah desa, pengurus BUMDes, dan masyarakat, maka fungsi BUMDes dapat lebih maksimal dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Desa, diharapkan lebih memperkuat regulasi dan memberikan dukungan penuh, baik dalam bentuk kebijakan maupun pendanaan, sehingga BUMDes memiliki landasan hukum dan operasional yang lebih jelas dalam menjalankan aktivitas usaha.
2. Bagi Pengurus BUMDes, perlu meningkatkan kompetensi manajerial dan keterampilan usaha melalui pelatihan, pendampingan, dan kerja sama dengan pihak eksternal agar pengelolaan unit usaha dapat berjalan lebih profesional dan berkelanjutan.
3. Bagi Masyarakat Desa, partisipasi aktif dalam kegiatan BUMDes sangat penting, baik sebagai konsumen, produsen, maupun pengawas, agar keberadaan BUMDes benar-benar mampu menjawab kebutuhan ekonomi desa dan memberikan manfaat nyata.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat memperluas lingkup penelitian, misalnya dengan membandingkan kinerja beberapa BUMDes di wilayah berbeda, sehingga dapat ditemukan pola terbaik dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, J. S., Retnaningdiah, D., & Hayati, K. (2022). Optimalisasi Peran Dan Fungsi BUMDes Astaguna Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Trihanggo. *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, 7(2), 155–162. <https://doi.org/10.33366/japi.v7i2.3684>
- Ali Miftakhu Rosyad. (2019). *Implementasi Pendidikan Karakter melalui Kegiatan Pembelajaran di Lingkungan Sekolah*. 5, 173–190.
- Ansori, H., Rozak, A., Lase, E. N., & Sahriani, I. (2024). *Strategi Pelayanan Kantor Kementerian Agama Kota Panyabungan*. 3(2), 337–343.
- Bintarto, R. (2010). *Desa dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Eko Sutoro, (2015), Regulasi Baru, Desa Baru ide, misi, dan semangat uu desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Fadhila Ayu Ratnasari, & Arie Ambarwati. (2022). Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Masyarakat Berdaya Menuju Kota Pariwisata Di Kota Blitar. *Policy and Maritime Review*, 1(2), 63–69. <https://doi.org/10.30649/pmr.v1i2.35>
- Hidayat, E. (2021). Transisi Kenormalan Baru : Eksistensi BUM Desa, UMKM, dan Ormas. In *Program Studi Administrasi Publik*. http://repository.upnjatim.ac.id/5595/1/Book_Chapter_Prodi_Administrasi
- Mulyana. (2018). Optimizing The Management Of Village-Owned Enterprises (Bumdes) In Buay Bahuga District, Way Kanan Regency. *Prosiding Seminar Nasional Penerapan IPTEKS*, 172–177.
- Muslim, M., Lastriani, L., & Wijaya, D. (2023). Peran Dan Fungsi Bumdes Dalam Rangka Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat Di Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes. *Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik*, 4(1), 271–277. <https://doi.org/10.58406/kapitaselekt.a.v4i1.1331>
- N.Daldjoeni, 2011. Interaksi Desa – Kota, Jakarta : Rineka Cipta.
- Nia Febriani. (2022). *Optimalisasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kubang Jaya*.
- Novita Riyanti, & Hermawan Adinugraha, H. (2021). Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Singajaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Bodas Kecamatan Watukumpul). *Al-Idarah : Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(1), 80–93. <https://doi.org/10.35316/idarah.2021.v2i1.80-93>
- Rudiadi. (2022). Optimalisasi peningkatan pajak daerah melalui retribusi pelayanan pasar tradisional di kec tanah putih kabupaten rokan hilir berdasarkan peraturan daerah kab rohil No 21 Tahun 2011. 3(8.5.2017), 2003–2005. www.aging-us.com
- Sambode, R. A., Tulusan, F., & Londa, V. Y. (2019). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mempromosikan Pariwisata Tanjung Bongo di Desa Soasio Kecamatan Galega Induk Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(084), 62–69.

- Setiawan Guntur. 2004. Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan. Jakarta. Balai Pustaka
- Seyadi. (2003). Bumdes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa. Yogyakarta: UPP STM YKPN.
- Seyadi. 2003. Bumdes sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa. Yogyakarta: UPP STM YKPN.
- Sidik, Machfud, 2001, Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah, Artikel hlm. 8
- Soekanto.2002. Teori Peranan. Jakarta. Bumi Aksara. Permendes Nomor 4 tahun 2015 Undang-Undang Desa Pasal 87 ayat (1)
- Widjaja, H. A. W. (2009). *Otonomi Desa: Berdasarkan UUD 1945*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.



LAMPIRAN

















**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Satriani Masir

Nim : 105611115620

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	0%	10 %
2	Bab 2	3%	25 %
3	Bab 3	2%	10 %
4	Bab 4	0%	10 %
5	Bab 5	0%	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 26 Agustus 2025

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nursinali, S.Hum, M.I.P.
NBM. 964.591

BAB I Satriani Masir

105611115620



Submission date: 26-Aug-2025 08:52AM (UTC+0700)

Submission ID: 2735335945

File name: BAB_I_62.docx (22.46K)

Word count: 1589

Character count: 11110

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On

Exclude matches

< 2%



BAB II Satriani Masir

105611115620

by Tahap Tutup



Submission date: 26-Aug-2025 08:52AM (UTC+0700)

Submission ID: 2735336415

File name: BAB_II_57.docx (111.9K)

Word count: 3918

Character count: 27133

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

- 1 repository.upnjatim.ac.id 3%
Internet Source

Exclude quotes On
Exclude bibliography On
Exclude matches < 2%



BAB III Satriani Masir

105611115620

by Tahap Tutup



Submission date: 26-Aug-2025 08:53AM (UTC+0700)

Submission ID: 2735336939

File name: BAB_III_74.docx (19.34K)

Word count: 992

Character count: 6984



PRIMARY SOURCES

1	id.123dok.com	2%
	Internet Source	

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BAB IV Satriani Masir

105611115620



Submission date: 26-Aug-2025 08:55AM (UTC+0700)

Submission ID: 2735337822

File name: BAB_IV_56.docx (1,004.63K)

Word count: 6929

Character count: 48185

BAB IV Satriani Masir 105611115620

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
Exclude bibliography On



BAB V Satriani Masir

105611115620



Submission date: 26-Aug-2025 08:55AM (UTC+0700)

Submission ID: 2735338221

File name: BAB_V_70.docx (16.95K)

Word count: 679

Character count: 4698

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On

Exclude matches

< 2%



RIWAYAT HIDUP



Satriani Masir, atau akrab disapa Satriani, lahir pada tanggal 10 Oktober 2002 di Desa Bantilang. Merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Ayahanda Masir dan Ibunda Sakka.

Perjalanan pendidikan formal dimulai pada tahun 2007 di Taman Kanak-Kanak. Setahun kemudian, tepatnya tahun 2008, peneliti melanjutkan pendidikan di SD Negeri 266 Bantilang dan berhasil menamatkannya pada tahun 2014. Setelah itu, menempuh pendidikan di SMP Negeri 2 Towuti hingga lulus pada tahun 2017.

Jenjang pendidikan menengah atas dijalani di SMA Negeri 2 Palopo selama tiga tahun, dan berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 2020. Pada tahun yang sama, Satriani melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dengan konsentrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

Selama perjalanan akademik, minat pada bidang administrasi dan pembangunan desa mendorongnya untuk menyusun skripsi dengan judul "*Optimalisasi Pelaksanaan Peran dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bantilang, Kabupaten Luwu Timur*". Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat dan desa tempat tinggal.